



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

Provinsi Gorontalo

TAHUN 2025-2029



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui **scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini berhasil diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman penting dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan bagi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo selama lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Renstra Setda Provinsi Gorontalo ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Setda sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan teknis dan analisis kebijakan. Dalam konteks pembangunan Provinsi Gorontalo yang berkelanjutan, peran Setda sangat sentral sebagai motor penggerak birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani.

Dokumen ini memuat Tujuan, dan Sasaran Strategis yang terukur yang selaras dengan Visi Misi Kepala Daerah, didukung oleh program dan indikator kinerja yang jelas. Fokus utama Renstra ini adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan publik internal dan eksternal, serta optimalisasi dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan sinergi dari seluruh jajaran di lingkungan Setda Provinsi Gorontalo.

Kami berharap Renstra tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dan terintegrasi dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Gorontalo, 07 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun, sebagai langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renstra wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan perumusan Renstra yang jelas dan sinergis oleh OPD, maka dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2029 .

Penyusunan dokumen Renstra secara objektif harus berlandaskan isu strategis dan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis daerah. Isu strategis yang terhimpun harus dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar visi misi Pemerintah Daerah dapat tercapai.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
23. Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
24. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

b. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan mendukung Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah 2025-2029;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 111 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPD Provinsi Gorontalo 2025-2029 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2025-2029 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo 2025-2029. strategi dan arah kebijakan yang akan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





dilakukan oleh Sekretariat Daerah selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang didalamnya terurai program, kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam periode Renstra. indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Resntra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

➤ Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian Kesatu disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

➤ Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

➤ Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing asisten membawahi Biro-Biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, selain itu terdapat pula Kelompok Pejabat Fungsional yang dibawah langsung oleh Kepala Biro. Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo membawahi:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1.1. Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Pemerintahan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1.2. Susunan Organisasi Biro Hukum terdiri dari:
- a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian Bantuan Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- 2.1 Susunan Organisasi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Kepala Biro;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2.2 Susunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
- a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa serta Tata Usaha.
 - d. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Administrasi Umum
- 3.1 Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri dari:
- a. Kepala Biro
 - b. Bagian Kelembagaan dan Anjab;
 - c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3.2 Susunan Organisasi Biro Umum terdiri dari:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
- d. Bagian Administrasi Pimpinan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 6 (enam) Biro, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 dapat digambarkan pada Gambar berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

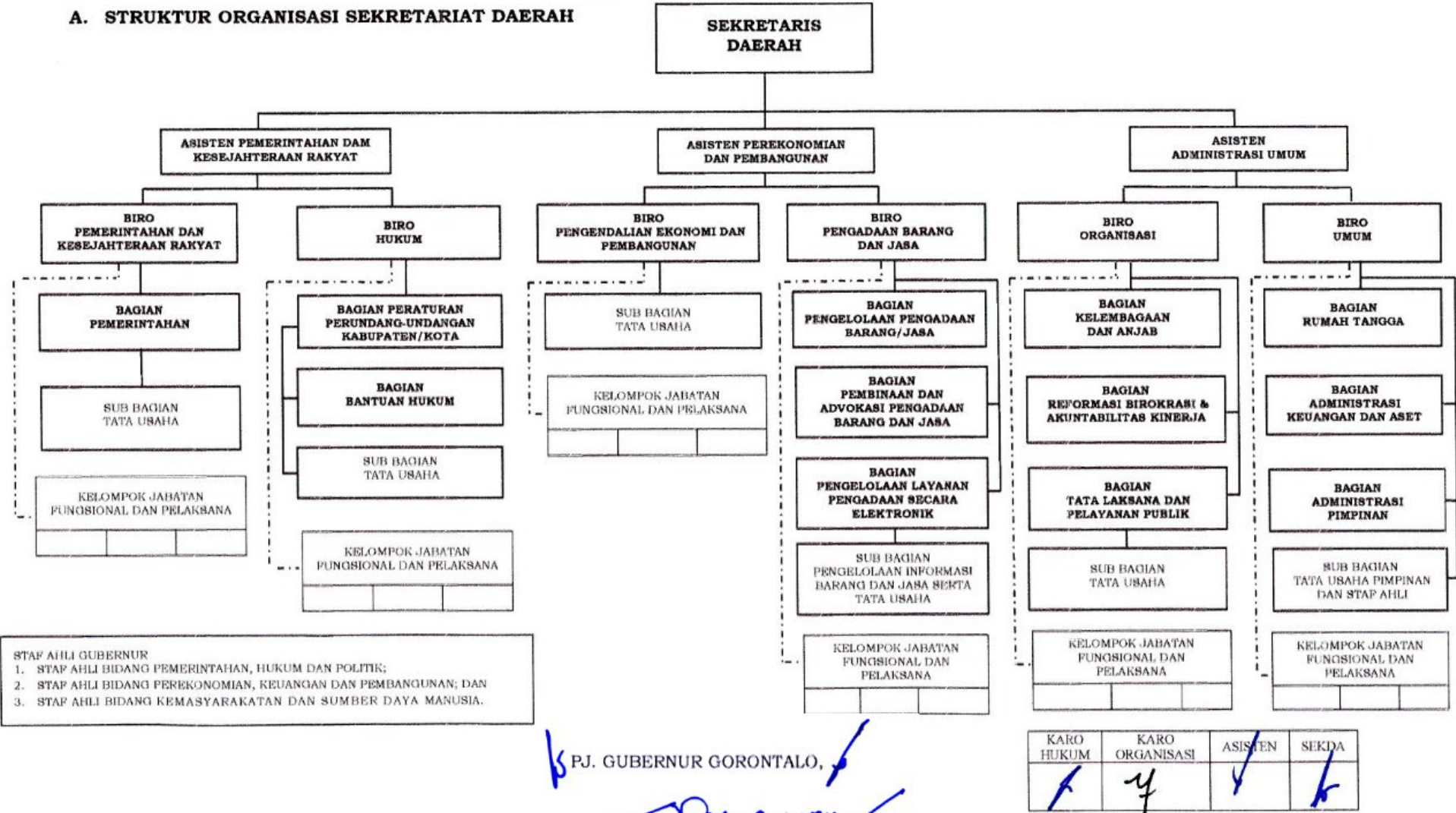
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





b. Sumber Daya Perangkat Daerah

➤ Sumber Daya Pendukung Aparatur Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pastilah harus didukung dengan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang di emban.

Guna mendukung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai sumberdaya manusia yang memadai, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan. Kondisi SDM di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan 30 Agustus 2025.

Pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kompetensi yang dibutuhkan. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Disabilitas	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1		0	1 Orang
2	Assisten I,II,III	2	1	0	3 Orang
3	Staf Ahli	3		0	3 Orang
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	15	10	0	25 Orang
5	Biro Hukum	13	9	0	22 Orang
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	10	11	0	21 Orang
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	23	12	0	35 Orang
8	Biro Organisasi	7	18	0	25 Orang
9	Biro Umum	30	24	0	54 Orang
Jumlah					189 Orang

Sumber data pengelola Kepegawaian Masing-masing Biro tahun 2025

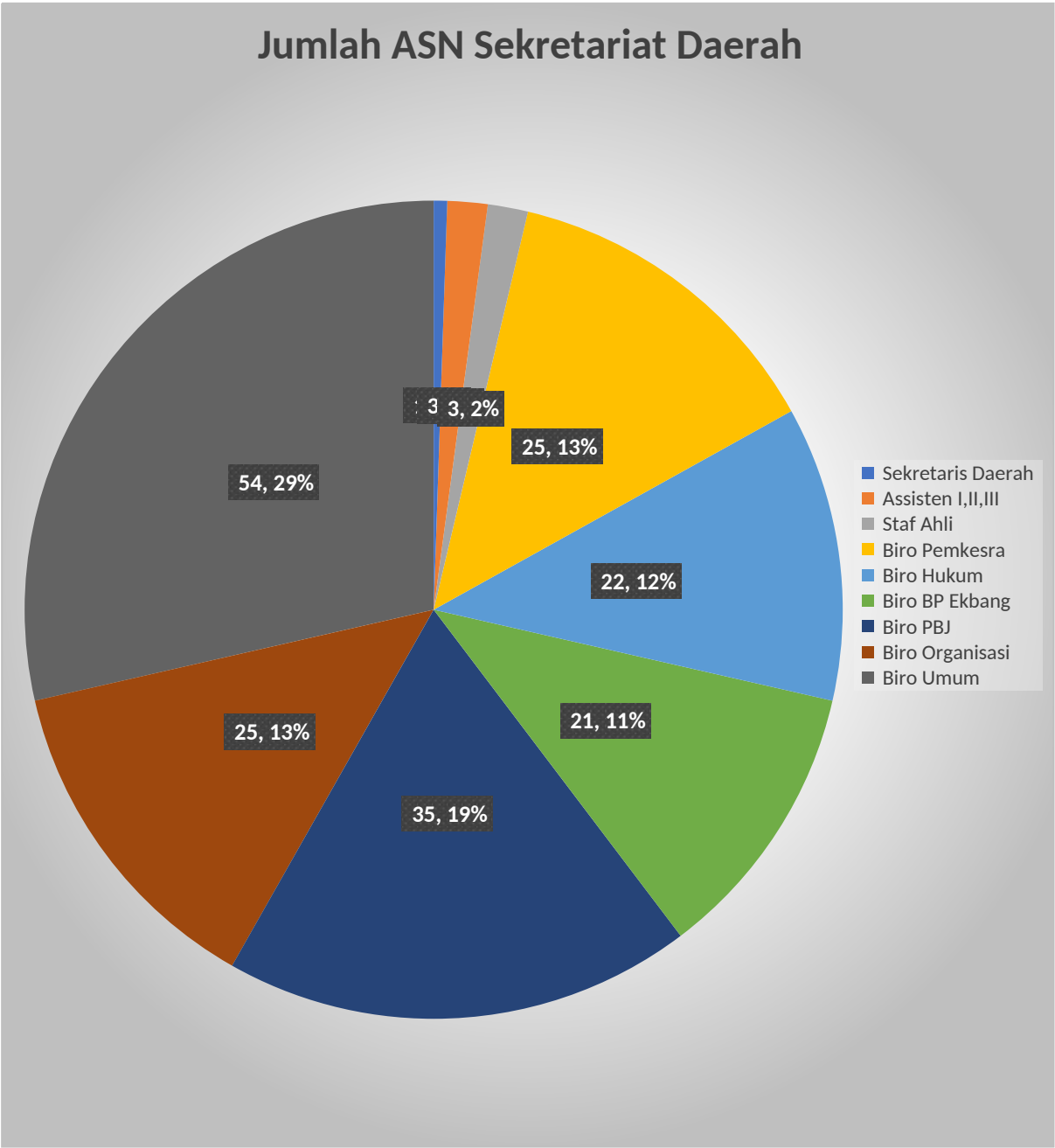
Jumlah Persentase aparatur Sekretariat Daerah menurut unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 2.1 Jumlah ASN Sekretariat Daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Sumber data pengelola Kepegawaian Masing-masing Biro tahun 2025

Selain Pegawai Negeri Sipil, kinerja Sekreariat Daerah juga didukung oleh tenaga penunjang operasional kegiatan yang bertugas di masing-masing unit kerja/Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah, dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Penunjang Operasional Sekretariat Daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





NO	UNIT KERJA	L	P	Disabilitas	JUMLAH
1	Biro Pemerintahan dan Kesra	4	5	0	9 Orang
2	Biro Hukum	5	4	0	9 Orang
3	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5	3	0	8 Orang
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5	5	0	10 Orang
5	Biro Organisasi	3	8	0	12 Orang
6	Biro Umum	55	44	0	99 Orang
TOTAL					216 Orang

Sumber data pengelola Kepegawaian Masing-masing Biro tahun 2025

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Target Indikator tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	2023	2024	Kriteria
	Terwujudnya Good and lean Government	Indeks Reformasi Birokrasi (General)	Nilai	100	66,36	70,25	BB

Sumber data Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2024

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini yang selanjutnya menjadi pijakan bagi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas fungsi yang diemban yang kemudian dijabarkan dalam sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi General (RB) Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 memperoleh indeks 70,25 dengan kategori BB. Capaian atas hasil evaluasi RB tahun 2024 ini mengalami Kenaikan dibandingkan tahun 2023 senilai 66,36.

Catatan:





Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam road map reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo perubahan 2023-2024. Sampai dengan akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Selain pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus pada pelaksanaan RB tematik dalam upaya menjawab isu-isu strategis Nasional saat ini dan utamanya isu strategis daerah yaitu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

Kemudian, dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan Setda Provinsi Gorontalo antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Setda Provinsi Gorontalo yang di intervensi ke Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi target dan capaian realisasinya yaitu Nilai Sakip B, Indeks Kematangan Organisasi 48, Nilai Maturitas SPBE 4,13, Indeks Kerukunan Umat Beragama 72,71 (*Sumber LKIP Setda Tahun 2024*).

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo beserta target dan realisasi serta capaiannya.

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tercapai dengan persentase capaian rata-rata 100 persen bahkan lebih Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kemudian Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya tahun 2024.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 2.4 Tabel Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	0	0	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2	Level 2	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,50	69,96	
		Indeks Pelayanan Publik	4,24	4,04	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83,36	90,41	
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	75,08	75	
		Indeks Reformasi Hukum	66,38	86,82	
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	76,86	82,51	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Sekretariat Daerah	86,44	86,47	

Sumber Data: Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD), juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Berkenaan dengan rasio realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk semua program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dikarenakan dengan anggaran yang ada seluruh kegiatan yang didanai dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





d. Kelompok Sasaran Layanan

➤ Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian Kesatu disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Secara sederhana, stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Secara Rinci Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah antara lain :

1) Biro Pemerintahan dan Kesra

1. **Seluruh penerima layanan administrasi hibah lembaga bina spiritual**
Biro Pemerintahan dan Kesra memberikan fasilitasi administrasi terhadap penyaluran hibah kepada lembaga-lembaga bina spiritual di Provinsi Gorontalo. Layanan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran lembaga keagamaan dan spiritual dalam membina kehidupan masyarakat yang religius, berkarakter, serta mendukung terciptanya ketenteraman sosial.
2. **Seluruh mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Gorontalo**
Melalui pengelolaan program beasiswa, Biro Pemerintahan dan Kesra menjadi penghubung kebijakan pemerintah daerah dengan generasi muda, khususnya mahasiswa. Sasaran layanan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan tinggi, serta mencetak lulusan yang unggul dan mampu bersaing.
3. **Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampuh kerja sama daerah**
Dalam aspek koordinasi kerja sama daerah, Biro Pemerintahan dan Kesra berperan memberikan layanan fasilitasi dan administrasi bagi seluruh OPD yang menjadi pengampuh kerja sama daerah, baik kerja sama antar daerah, dengan pihak ketiga, maupun dengan lembaga lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4. **Enam OPD pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
Kelompok sasaran layanan berikutnya adalah enam OPD yang menjadi penanggung jawab urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Biro Pemerintahan dan Kesra berperan melakukan koordinasi, monitoring, dan fasilitasi dalam pelaksanaan SPM agar layanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar yang ditetapkan.
5. **Seluruh OPD pengampuh Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**
Biro Pemerintahan dan Kesra juga memberikan layanan fasilitasi kepada seluruh OPD yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan LPPD. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data, konsistensi pelaporan, dan kualitas dokumen LPPD sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

2) Biro Pengadaan

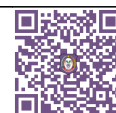
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





1. Internal Pemerintah (Aparatur Sipil Negara/Unit Kerja)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Pejabat/PPBJ lain yang menjalankan tugas pengadaan.
 - Unit kerja/SKPD/OPD yang membutuhkan barang/jasa untuk pelaksanaan program/kegiatan.
2. Eksternal (Penyedia Barang/Jasa)
 - Pelaku usaha/kontraktor/penyedia jasa konsultansi yang mengikuti proses lelang/tender maupun non-tender.
 - UMKM/IKM/Kooperasi lokal yang didorong untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah (sesuai kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal).
 - Pendampingan dan Mentoring Kematangan dan Koordinasi UKPBJ Kab/Kota
3. Lembaga Pengawasan dan Regulator
 - Inspektorat Daerah, BPK, KPK, LKPP yang memiliki kepentingan dalam memastikan pengadaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

3) Biro Hukum

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Biro Hukum berperan memberikan layanan Perumusan, Pengordinasian, Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah dibidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

2. Enam Kabupaten/Kota Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah kab/Kota

Evaluasi dan fasilitasi kabupaten/kota adalah proses untuk menilai kinerja dan mendukung perkembangan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kegiatan ini melibatkan pendampingan, penelaahan, dan pemberian masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) untuk memastikan produk hukum daerah efektif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

3. Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Hukum

Biro Hukum Memberikan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam layanan jasa hukum gratis yang diberikan kepada orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Bantuan ini dapat berupa pendampingan dalam perkara di pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi), yang disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM

4) Biro Ekonomi Pembangunan

1. Seluruh Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Provinsi

Memberikan Pelayanan dalam pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan, dan Pengendalian Ekonomi.

Pimpinan Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah)

 - Sebagai penerima laporan, bahan pengambilan keputusan, serta rekomendasi kebijakan Pembangunan dan Ekonomi.
2. Pemerintah Pusat
 - Kementerian/Lembaga yang membutuhkan data, laporan monitoring evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi
3. DPRD Provinsi Gorontalo
 - Sebagai pengawasan, pembahasan kinerja Pembangunan dan Ekonomi, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah.
4. Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Secara tidak langsung menjadi penerima manfaat dari hasil pengendalian, evaluasi, dan penyediaan data Pembangunan dan Ekonomi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- o Dalam konteks koordinasi pembangunan lintas daerah serta integrasi data Pembangunan dan Ekonomi provinsi dengan kabupaten/kota.

5) Biro Organisasi

Seluruh Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Bagian Organisasi Kab/Kota se Provinsi Gorontalo

Memberikan Pelayanan dalam penyusunan peta proses bisnis, SOP, SP, SKM, Sakip, Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kab/kota, Penyusunan Anjab dan Abk.

6) Biro Umum

1. Pimpinan Daerah
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagai penerima layanan utama dalam bentuk dukungan administrasi, tata usaha, protokoler, rumah tangga, dan fasilitasi kegiatan kedinasan.
2. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukan dukungan sarana, prasarana, layanan umum, dan tata kelola administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD Provinsi
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memanfaatkan layanan terkait kebutuhan perkantoran, administrasi umum, perjalanan dinas, serta dukungan operasional lainnya.
4. Lembaga/Instansi Vertikal dan Mitra Kerja Pemerintah
Instansi pusat maupun daerah, lembaga vertikal, serta mitra kerja yang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui fasilitasi layanan keprotokolan, persuratan, dan penyediaan sarana pendukung.
5. Masyarakat secara Tidak Langsung
Warga daerah yang memperoleh manfaat melalui peningkatan kualitas layanan pemerintahan, penyelenggaraan acara resmi daerah, serta ketersediaan dukungan layanan administrasi yang efektif dan efisien.

Mitra OPD dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

Beberapa mitra OPD dalam pemberian layanan di antaranya:

➤ Biro Pemerintahan dan Kesra

1. Pelayanan Embarkasi Haji Antara Dalam penyelenggaraan pelayanan keberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Embarkasi Haji Antara Gorontalo, Biro Pemerintahan dan Kesra bermitra dengan Kementerian Agama dan PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Provinsi Gorontalo. Sinergi ini sangat penting untuk menjamin kelancaran, kenyamanan, dan keamanan jamaah haji sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan.
2. Pelayanan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Dalam penyusunan LPPD, Biro Pemerintahan dan Kesra bermitra dengan Inspektorat Daerah. Kerja sama ini bertujuan memastikan penyajian data dan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai standar, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pelayanan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Untuk menjamin pencapaian dan pelaporan SPM sesuai ketentuan, Biro Pemerintahan dan Kesra menjalin kemitraan dengan Bappeda dan Inspektorat. Kolaborasi ini berfungsi memperkuat koordinasi perencanaan, pengendalian, serta pengawasan dalam pencapaian target SPM yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





4. Pelayanan Penyusunan Dokumen Kerja Sama Dalam hal fasilitasi dan penyusunan dokumen kerja sama daerah, Biro Pemerintahan dan Kesra bermitra dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap kerja sama daerah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkelola secara baik, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

➤ **Biro Hukum**

1. Pelayanan Evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Daerah provinsi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum memberikan bantuan teknis dan fasilitasi agar penyusunan produk hukum daerah berjalan sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu dokumen yang merencanakan dan mengimplementasikan upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di wilayah tersebut. Biro Hukum dan instansi terkait seperti Kanwil Kemenkumham Gorontalo aktif melakukan koordinasi dan penancangan untuk mencapai tujuan RANHAM, termasuk melalui program Kabupaten/Kota Peduli HAM
3. Dinas Teknis menjadi mitra Biro Hukum Provinsi dengan menyediakan data teknis dan substansi untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, memberikan kajian hukum terkait standar operasional prosedur (SOP) atau proyek strategis, serta terlibat dalam konsultasi hukum dan penyuluhan hukum bagi masyarakat terkait bidang keahlian dinas teknis tersebut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Biro Hukum Provinsi pada fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan pengawasan pelaksanaannya, di mana DPRD bersama dengan pemerintah daerah (termasuk biro hukum sebagai bagian dari eksekutif) bekerja sama untuk membuat peraturan daerah. Biro Hukum Provinsi berperan sebagai salah satu mitra karena mereka adalah bagian dari struktur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah.
5. Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai mitra kepolisian dengan memberikan dukungan hukum, konsultasi, dan advokasi dalam penyusunan peraturan daerah, penyelesaian masalah hukum, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum terkait kepolisian. Kemitraan ini terwujud dalam saling berkoordinasi untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan efektif dalam mendukung tugas kepolisian
6. Lembaga Pendidikan/Akademisi: Dalam kajian hukum atau telaahan produk hukum yang kompleks, Biro Hukum dapat melibatkan pakar dari Fakultas Hukum di universitas untuk mendapatkan pandangan akademis yang mendalam.

➤ **Biro Ekonomi Pembangunan**

1. Perangkat Daerah Internal Provinsi
2. Bappeda Provinsi dalam perencanaan pembangunan dan sinkronisasi RPJMD/RKPD.
3. BPKAD Provinsi → dalam pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan pembangunan.
4. Inspektorat Daerah → dalam pengawasan, evaluasi, serta tindak lanjut rekomendasi kinerja OPD.
5. Dinas Kominfo dan Statistik → dalam penyediaan data, sistem informasi, serta publikasi hasil evaluasi Pembangunan dan Ekonomi.
6. Seluruh OPD Teknis (Dinas/Badan/Biro) → sebagai pelaksanaan program pembangunan dan ekonomi yang dimonitor, dievaluasi, dan dikendalikan.
7. Mitra Eksternal Pemerintah Daerah
8. Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo → integrasi data, sinkronisasi, dan evaluasi Monitoring pembangunan dan ekonomi daerah.
9. DPRD Provinsi → dalam penyusunan LKPJ, pembahasan kinerja pembangunan, serta pengawasan.
10. Mitra Pemerintah Pusat
11. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Ditjen Otda) → pedoman evaluasi kinerja dan pelaporan pembangunan dan ekonomi daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





12. BPS → sebagai penyedia data statistik resmi Pembangunan dan Ekonomi.
13. BI, Bulog, Pertamina, Hiswana/Migas Sebagai Koordinasi Data Ekonomi.

➤ **Biro Organisasi**

1. Bappeda : Koordinasi Perencanaan, implementasi AKIP dan evaluasi RB PD
2. Inspektorat : Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi AKIP Internal dan evaluasi RB PD
3. Dinas Kominfo : Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi SPBE yang terkait dengan akuntabilitas dan ketatalaksanaan.
4. Dinas kearsipan dan perpustakaan : Koordinasi tata kelola ketatalaksanaan
5. BKD : Koordinasi penataan dan pengembangan ASN dan evaluasi RB PD
6. Biro Hukum : Koordinasi dan Fasilitasi kebijakan pelaksanaan penataan kelembagaan, RB, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan dan
7. Seluruh Perangkat Daerah : Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, RB, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik, serta pelaksanaan evaluasi kelembagaan, RB, AKIP dan pelaksanaan Pelayanan Publik

➤ **Biro Umum**

1. Biro Hukum

Koordinasi terkait penyusunan regulasi, telaah hukum atas perjanjian, dan dukungan aspek legal administrasi umum.

2. Biro Organisasi

Terkait penguatan tata laksana, penataan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Untuk pengelolaan anggaran, belanja operasional, serta pencatatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik daerah.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dalam perencanaan dan sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Mendukung penyediaan sistem informasi, digitalisasi layanan administrasi, dan publikasi kegiatan pemerintahan.

6. OPD Teknis Lainnya

Termasuk dinas/instansi yang membutuhkan dukungan layanan umum seperti penyediaan ruang, logistik, perjalanan dinas, dan keperluan administratif lainnya.

Melalui sinergi dengan para mitra tersebut, Biro Pemerintahan dan Kesra berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih akuntabel, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Sekretariat Daerah antara lain:

1. Kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang transportasi darat. Melalui kerja sama dengan STTD, pemerintah daerah berupaya menyiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi teknis dan profesionalitas tinggi dalam mendukung sistem transportasi darat yang aman, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
2. Kerja sama dengan Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo
Kerja sama dengan ATMI Solo dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas pendidikan vokasi di Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





kompetensi lulusan vokasi agar mampu bersaing di dunia industri, memiliki keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mendukung pengembangan sektor industri dan manufaktur di daerah. Dengan kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mencetak SDM unggul dan produktif melalui jalur pendidikan vokasi.

3. Kerja sama-kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo, sekaligus memperkuat peran daerah dalam menjawab tantangan pembangunan jangka menengah.
4. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung Jawab perangkat daerah. Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka Pengendalian Inflasi dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2025

2. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Gorontalo masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain:

➤ **Biro Pemerintahan dan Kesra**

- 1) Akses layanan pendidikan belum merata : Partisipasi Pendidikan tinggi belum optimal, tercatat tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya mencapai 35,50 persen;
- 2) Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal : tercatat indeks kerukunan beragama mengalami penurunan dari capaian 73.25 tahun 2023 menjadi 72.71 di tahun 2024;
- 3) Capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Gorontalo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan ketidakstabilan : tercatat nilai LPPD merosot tajam menjadi 2,49 dengan predikat rendah dan mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2022 dengan capaian 3,2127 dengan predikat sedang;
- 4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Wajib menjadi Atensi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo : tercatat ditahun 2021 capaian 80,99% , Tahun 2022 55,85%, dan mengalami sedikit perbaikan di tahun 2023 92,81%;
- 5) Belum Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, dan antara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Parimo;
- 6) Fasilitas Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta/Badan Usaha Perlu menjadi atensi Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tercatat 85 dokumen kerjasama daerah yang perlu mempedomani Permendari no 22 tahun 2020;
- 7) Belum Terwujudnya Pelaksanaan Embarkasi Haji Penuh di Provinsi Gorontalo.

➤ **Biro Hukum**

- 1) Kurangnya Penguatan sinergi dan koordinasi Bapemperda DPRD dan OPD dalam Menyusun analisis Perda tahun 2024 terdapat 2 peraturan daerah yang belum sesuai dengan kondisi lapangan;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- 2) Pelaksanaan peningkatan Advokasi kepada OPD terkait tindak lanjut produk hukum belum ada perhatian dari Setiap OPD yang melaksanakannya;
- 3) Tim penyusun Produk Hukum belum memadai jumlah kebutuhan analisis hukum yang dibutuhkan 6 orang pada realitanya cuman 3 orang;
- 4) Masih Kurangnya kepatuhan pemerintah Kabupaten Kota dalam merumuskan produk hukum daerah ada 9 produk hukum yang tidak berkesesuaian dengan mekanisme penyusunan;
- 5) Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga miskin terdapat 3 masalah hukum yang diajukan kepada pemerintah daerah yang belum diselesaikan;
- 6) Masih terdapat 10 dari 20 OBH (organisasi bantuan hukum) yang belum difasilitasi untuk melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

➤ **Biro Ekonomi Pembangunan**

- 1) Kurangnya Monitoring paket pekerjaan, sehingga banyak paket pekerjaan yang progresnya lambat;
- 2) Belum optimalnya pengambilan kebijakan ekonomi;
- 3) Penerapan BLUD yang masih merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga belum dianggap prioritas;

➤ **Biro Pengadaan**

- 1) Kualitas Penyelenggaraan PBJ belum maksimal dapat dilihat dari masih adanya paket pekerjaan yang mengalami putus kontrak dan masih terdapatnya beberapa temuan pemeriksaan eksternal terkait kualitas pengadaan barang dan jasa.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi pada perangkat daerah khususnya pada sistem informasi Pengadaan Secara Elektronik belum dimanfaatkan secara optimal sesuai indikator ITKP dari nilai maksimal 30% realisasi 19,5% di tahun 2024;
- 3) Masih kurangnya kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM PBJ sesuai indikator ITKP dari nilai maksimal 30% realisasi 10,46% di tahun 2024;
- 4) Belum maksimalnya kualitas kelembagaan PBJ sesuai indikator ITKP dari nilai Maksimal 40% masih terdapat kabuapten kota di bawah nilai maksimal sebesar 35,56%
- 5) Kurangnya Sarana prasarana penunjang tugas dan Fungsi OPD biro Pengadaan. Dari beberapa usulan RKBMD Tahun 2025 diantaranya mobil operasional, genset, server dan laptop penunjang pokja pemilihan belum terealisasi disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran;

➤ **Biro Organisasi**

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan 0.02 point dari 77,75 kategori BB pada tahun 2023 menjadi 77,73 kategori BB pada tahun 2024;
- 2) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B dengan kenaikan 0.22 dari 68.66 tahun 2023 menjadi 68.88 pada tahun 2024;
- 3) Jumlah perangkat daerah yang menerapkan aspek Pelayanan Publik kategori baik, terdiri 5 unit Pelayanan publik dari 41 layanan publik yang berada di seluruh perangkat daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi pada perangkat daerah belum dilakukan berdasarkan proses bisnis dan layanan, dimana masih terdapat 38 dari 283 proses yang belum dipetakan kedalam peta proses bisnis dan terdapat 508 dari 1193 layanan yang belum memiliki SOP;
- 5) Belum Optimalnya Skor Komposit hasil Evaluasi Kelembagaan yaitu 72,23 dengan peringkat komposit P-4.

➤ **Biro Umum**

- 1) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas dan Fungsi OPD Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum memenuhi standar kebutuhan minimum, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal;
- 2) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Belum Tepat Sasaran Proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) masih belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan berorientasi kinerja, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- 3) Ketimpangan Kompetensi dan Distribusi Sumber Daya Aparatur Terdapat ketidakseimbangan dalam penyebaran aparatur baik dari segi jumlah maupun kompetensi di berbagai unit kerja, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kualitas layanan Kepada Pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- 4) Budaya Kerja Efisien dan Disiplin yang Belum Terinternalisasi : Etos kerja, kedisiplinan, serta efisiensi dalam bekerja belum menjadi budaya yang melekat di lingkungan aparatur OPD, sehingga berdampak pada kinerja organisasi yang belum optimal.

b. Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan kebijakan utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut :

➤ **Biro Pemerintahan dan Kesra**

- 1) Tingkat Partisipasi pendidikan tinggi yang masih rendah, yaitu sebesar 35,50% mencerminkan belum optimalnya akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan tinggi;
- 2) Penurunan Indeks Kerukunan umat Beragama dari 73,35 ditahun 2023 menjadi 72.71 di tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika sosial yang berpotensi mengangu harmoni kehidupan beragama;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- 3) Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih berada pada kategori sedang dengan skor 3,2127 mencerminkan perlu peningkatan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh;
- 4) Capaian Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang cenderung fluktuatif dengan perubahan signifikan dari tahun ke tahun mencerminkan belum stabilnya kualitas dan konsistensi pemenuhan layanan dasar dalam perspetif pelaporannya;
- 5) Belum Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penegasab batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, dan antara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Parimo;
- 6) Belum Optimalnya fasilitasi Kerjasama Daerah, meskipun 85 dokumen kerjasama daerah yang difasilitasi dari tahun ke tahun 2024 mencerminkan perlunya penguatan kelembagaan dan strategi kolaborasi sektoral;
- 7) Belum Terwujudnya Pelaksanaan Embarkasi Haji Penuh di Provinsi Gorontalo berdampak pada efektivitas pelayanan ibadah haji serta perlunya percepatan penyediaan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan yang mendukung pelayanan haji secara mandiri di daerah.

➤ **Biro Hukum**

- 1) kurangnya penguatan sinergi dan koordinasi antara Bapemperda DPRD dan OPD dalam penyusunan analisis Perda, yang mengakibatkan dua peraturan daerah tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan;
- 2) Tindak lanjut terhadap produk hukum yang telah disusun dan disahkan masih kurang mendapat perhatian dari masing-masing OPD yang bertanggung jawab, yang mengakibatkan rendahnya implementasi kebijakan dan produk hukum yang tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat;
- 3) Tim penyusun produk hukum saat ini belum memadai, dengan hanya tiga orang yang tersedia, padahal dibutuhkan enam orang untuk melakukan analisis hukum yang komprehensif. Hal ini berpotensi menghambat kualitas dan kelancaran proses penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Masih terdapat sembilan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan yang telah ditetapkan, mencerminkan kurangnya kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan prosedur yang berlaku, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan pengawasan hukum di daerah;
- 5) Terdapat tiga masalah hukum yang dihadapi keluarga miskin yang diajukan kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum diselesaikan, yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- 6) Sebanyak 10 dari 20 OBH yang ada belum mendapatkan fasilitas yang memadai untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang menunjukkan ketimpangan dalam dukungan terhadap lembaga yang berperan penting dalam menyediakan akses hukum bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

➤ **Biro Ekonomi Pembangunan**

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- 1) Laporan progres sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan mengakibatkan sulitnya melakukan proses evaluasi dan pengambilan kebijakan;
- 2) kebijakan pemerintah yang belum mampu menjawab permasalahan pengendalian inflasi;
- 3) Belum ada kesamaan pemahaman dan pola pikir terkait BLUD.

➤ **Biro Pengadaan**

- 1) Belum optimalnya tatakelola pelayanan Pengadaan Barang dan jasa

➤ **Biro Organisasi**

- 1) Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal, khususnya Reformasi Birokrasi Tematik yang mengalami penurunan secara signifikan;
- 2) Komitmen Perangkat Daerah dalam manajemen kinerja masih rendah;
- 3) Pelayanan publik masih dilaksanakan secara parsial;
- 4) Penerapan aspek pelayanan publik masih rendah;
- 5) Digitalisasi proses bisnis dan layanan belum sepenuhnya dilakukan;
- 6) Belum efektif dan efisien kelembagaan dalam menunjang visi dan misi kepala daerah

➤ **Biro Umum**

- 1) Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
- 2) Kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Masih Belum Optimal;
- 3) Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
- 4) Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya.

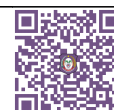
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.2 Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevn dengan PD	isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Biro Pemerintahan dan Kesra						
	Akses layanan pendidikan belum merata : Partisipari Pendidikan tinggi belum optimal, tercatat tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya mencapai 35,50 persen.					Tingkat Partisipasi pendidikan tinggi yang masih rendah, yaitu sebesar 35,50% mencerminkan belum optimalnya akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan tinggi
	Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal : tercatat indeks kerukunan beragama mengalami penurunan dari capaian 73.25 tahun 2023 menjadi 72.71 di tahun 2024					Penurunan Indeks Kerukunan umat Beragama dari 73,35 ditahun 2023 menjadi 72.71 di tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika sosial yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan beragama.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	Capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Gorontalo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan ketidakstabilan : tercatat nilai LPPD merosot tajam menjadi 2,49 dengan predikat rendah dan mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2022 dengan capaian 3,2127 dengan predikat sedang.					Nilai Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang masih berada pada kategori sedang dengan skor 3,2127 mencerminkan perlu peningkatan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh
	1. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Wajib menjadi Atensi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo : tercatat ditahun 2021 capaian 80,99% , Tahun 2022 55,85%, dan mengalami sedikit perbaikan di tahun 2023 92,81%;					Capaian Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang cenderung fluktuatif dengan perubahan signifikan dari tahun ke tahun mencerminkan belum stabilnya kualitas dan konsistensi pemenuhan layanan dasar dalam perspetif pelaporannya.
	Belum Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, dan antara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Parimo					Belum Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penegasab batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, dan antara Kabupaten Pohuwato

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





						dan Kabupaten Parimo
	Fasilitasi Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta/Badan Usaha Perlu menjadi atensi Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tercatat 85 dokumen kerjasama daerah yang perlu mempedomani Permendari no 22 tahun 2020					Belum Optimalnya fasilitasi Kerjasama Daerah, meskipun 85 dokumen kerjasama daerah yang difasilitasi dari tahun ke tahun 2024 mencerminkan perlunya penguatan kelembagaan dan strategi kolaborasi sektoral
	Belum Terwujudnya Pelaksanaan Embarkasi Haji Penuh di Provinsi Gorontalo					Belum Terwujudnya Pelaksanaan Embarkasi Haji Penuh di Provinsi Gorontalo berdampak pada efektivitas pelayanan ibadah haji serta perlunya percepatan penyediaan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan yang mendukung pelayanan haji secara mandiri didaerah



Biro Hukum						
Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan Predikat BB. Namun capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B. Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B.	Kurangnya Penguatan sinergi dan koordinasi Bapemperda DPRD dan OPD dalam Menyusun analisis Perda tahun 2024 terdapat 2 peraturan daerah yang belum sesuai dengan kondisi lapangan	-			-	kurangnya penguatan sinergi dan koordinasi antara Bapemperda DPRD dan OPD dalam penyusunan analisis Perda, yang mengakibatkan dua peraturan daerah tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
	Pelaksanaan peningkatan Advokasi kepada OPD terkait tindak lanjut produk hukum belum ada perhatian dari Setiap OPD yang melaksanakannya					Tindak lanjut terhadap produk hukum yang telah disusun dan disahkan masih kurang mendapat perhatian dari masing-masing OPD yang bertanggung jawab, yang mengakibatkan rendahnya implementasi kebijakan dan produk hukum yang tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat



Akses pelayanan publik belum optimal	Tim penyusun Produk Hukum belum memadai jumlah kebutuhan analisis hukum yang dibutuhkan 6 orang pada realitanya cuman 3 orang					Tim penyusun produk hukum saat ini belum memadai, dengan hanya tiga orang yang tersedia, padahal dibutuhkan enam orang untuk melakukan analisis hukum yang komprehensif. Hal ini berpotensi menghambat kualitas dan kelancaran proses penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Masih Kurangnya kepatuhan pemerintah Kabupaten Kota dalam merumuskan produk hukum daerah ada 9 produk hukum yang tidak berkesesuaian dengan mekanisme penyusunan					Masih terdapat sembilan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan yang telah ditetapkan, mencerminkan kurangnya kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan prosedur



						yang berlaku, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan pengawasan hukum di daerah
	Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga miskin terdapat 3 masalah hukum yang diajukan kepada pemerintah daerah yang belum diselesaikan					Terdapat tiga masalah hukum yang dihadapi keluarga miskin yang diajukan kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum diselesaikan, yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin.
	Masih terdapat 10 dari 20 OBH (organisasi bantuan hukum) yang belum difasilitasi untuk melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin					Sebanyak 10 dari 20 OBH yang ada belum mendapatkan fasilitas yang memadai untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang menunjukkan ketimpangan dalam dukungan terhadap lembaga yang berperan penting dalam





						menyediakan akses hukum bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Biro Ekonomi Pembangunan						
	Kurangnya Monitoring paket pekerjaan, sehingga banyak paket pekerjaan yang progresnya lambat					Laporan progres sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan mengakibatkan sulitnya melakukan proses evaluasi dan pengambilan kebijakan
	Belum optimalnya pengambilan kebijakan ekonomi					kebijakan pemerintah yang belum mampu menjawab permasalahan pengendalian inflasi



	Penerapan BLUD yang masih merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga belum dianggap prioritas					Belum ada kesamaan pemahaman dan pola pikir terkait BLUD
Biro Pengadaan						



Akses pelayanan publik	Pemanfaatan Teknologi Informasi pada perangkat daerah khususnya pada sistem informasi Pengadaan Secara Elektronik belum dimanfaatkan secara optimal sesuai indikator ITKP dari nilai maksimal 30% realisasi 19,5% di tahun 2024; Masih kurangnya kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM PBJ sesuai indikator ITKP dari nilai maksimal 30% realisasi 10,46% di tahun 2024 Belum maksimalnya kualitas kelembagaan PBJ sesuai indikator ITKP dari nilai Maksimal 40% masih terdapat kabuapten kota di bawah nilai maksimal sebesar 35,56% Kurangnya Sarana prasarana penunjang tugas dan Fungsi OPD biro Pengadaan. Dari beberapa usulan RKBMD Tahun 2025 diantaranya mobil operasional, genset, server dan laptop penunjang pokja pemilihan belum terealisasi disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.	1. Penggunaan Produk yang tidak ramah lingkungan 2. Produksi Limbah yang diadakan 3. Tidak memerdayakan UMKM dan Produsen Lokal berkelanjutan 4. Pengadaan Infrastruktur yang mengabaikan resiko lingkungan	1. Dorongan global Sistem pengadaan berbasis teknologi dan transparansi digital 2. Kepatuhan terhadap standar internasional (OECD,WTO GTA, ISO 20400) 3. Green procurement/pengadaan berkelanjutan	1. Potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses perencanaan , pengadaan dan pelaksanaan kontrak 2. Peningkatan Kapasitas Aparat SDM PBJ dan Pelaku PBJ 3. Mendorong penggunaan PDN dan keterlibatan UKM dalam pengadaan 4. Peningkatan Transparansi dalam	1. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat 2. Pemanfaatan eprocurement belum optimal 3. Minimnya dukungan data perencanaan dan PBJ 4. Kesenjangan kapasitas SDM PBJ 5. Ketersediaan Penyedia barang/jasa yang terbatas	Belum optimalnya tatakelola pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
------------------------	--	---	---	---	---	---

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	Kualitas Penyelenggaraan PBJ belum maksimal dapat dilihat dari masih adanya paket pekerjaan yang mengalami putus kontrak dan masih terdapatnya beberapa temuan pemeriksaan eksternal terkait kualitas pengadaan barang dan jasa.			pengelolaan PBJ 5. Transformasi Sumber daya manusia dan kelembagaan PBJ dalam mewujudkan tata kelola PBJ yang integritas 6. Peningkatan Pemanfaatan teknologi digital		
--	--	--	--	---	--	--





Biro Organisasi						
Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan Predikat BB. Namun capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B. Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B.	Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan 0.02 point dari 77,75 kategori BB pada tahun 2023 menjadi 77,73 kategori BB pada tahun 2024.	-		Budaya birokrasi yang lemah (Grand Desain RB Nasional 2025-2045)	-	Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal, khususnya Reformasi Birokrasi Tematik yang mengalami penurunan secara signifikan
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B dengan kenaikan 0.22 dari 68.66 tahun 2023 menjadi 68.88 pada tahun 2024			Transformasi digital		Komitmen Perangkat Daerah dalam manajemen kinerja masih rendah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Akses pelayanan publik belum optimal	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan aspek Pelayanan Publik kategori baik, terdiri 5 unit Pelayanan publik dari 41 layanan publik yang berada di seluruh perangkat daerah.		Mega tren dunia 2020-2045 dimana tren perubahan teknologi kedepan akan di dominasi oleh teknologi informasi & komunikasi, otomatisasi dan robotik, serta artifical intelegensi	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal		Pelayanan publik masih dilaksanakan secara parsial
				Akses Pelayanan Publik Belum Memadai		Penerapan aspek pelayanan publik masih rendah
	Pemanfaatan Teknologi Informasi pada perangkat daerah belum dilakukan berdasarkan proses bisnis dan layanan, dimana masih terdapat 38 dari 283 proses yang belum dipetakan kedalam peta proses bisnis dan terdapat 508 dari 1193 layanan yang belum memiliki SOP			Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		Digitalisasi proses bisnis dan layanan belum sepenuhnya dilakukan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	Belum Optimalnya Skor Komposit hasil Evaluasi Kelembagaan yaitu 72,23 dengan peringkat komposit P-4			Penyederhanan Birokrasi		Belum efektif dan efisien kelembagaan dalam menunjang visi dan misi kepala daerah
Biro Umum						
	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas dan Fungsi OPD : Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum memenuhi standar kebutuhan minimum, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal.					Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Belum Tepat Sasaran : Proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) masih belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan berorientasi kinerja, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah.					Kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Masih Belum Optimal

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	Ketimpangan Kompetensi dan Distribusi Sumber Daya Aparatur : Terdapat ketidakseimbangan dalam penyebaran aparatur baik dari segi jumlah maupun kompetensi di berbagai unit kerja, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kualitas layanan Kepada Pimpinan dan Sekretariat Daerah,					Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata
	Budaya Kerja Efisien dan Disiplin yang Belum Terinternalisasi : Etos kerja, kedisiplinan, serta efisiensi dalam bekerja belum menjadi budaya yang melekat di lingkungan aparatur OPD, sehingga berdampak pada kinerja organisasi yang belum optimal.					Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera”, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan strategis Renstra 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.” Tujuan ini menjadi arah fundamental dalam memperkuat fungsi koordinatif Setda sebagai penggerak utama kelancaran birokrasi dan pelayanan pemerintahan.

Secara substansi, tujuan ini selaras dengan Tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, khususnya pada:

- a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yang menekankan pada terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan responsif melalui penguatan sistem koordinasi, reformasi birokrasi, serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang mendorong pengembangan kompetensi aparatur sebagai kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sekretariat Daerah memegang peran strategis dalam mengkoordinasikan penyelarasan kebijakan lintas perangkat daerah, fasilitasi penyusunan regulasi, serta pelaksanaan fungsi administrasi umum yang efisien dan adaptif. Upaya penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan kinerja layanan berbasis digital, penataan kelembagaan yang dinamis, serta pelaksanaan pengawasan internal yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi.

Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang mendukung percepatan pembangunan daerah, mendorong inovasi layanan publik, serta membangun kapasitas aparatur yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan arah tujuan tersebut, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk menjadi pusat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif, guna mendukung terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, berdaya saing, dan sejahtera secara berkelanjutan.

2. Sasaran Rensntra Sekretariat Daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi fokus kinerja pada periode perencanaan lima tahunan ini. Sasaran tersebut mencerminkan peran Setda dalam memperkuat fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan administratif lintas perangkat daerah Yaitu :

a. Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran “*Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*” dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung visi pembangunan daerah yaitu “Gorontalo Maju dan Sejahtera.” Sasaran ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Gorontalo yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta penguatan pelayanan publik.

Melalui sasaran ini, Sekretariat Daerah berperan strategis sebagai motor penggerak koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi lintas perangkat daerah, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat dapat berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran. Kebijakan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk menjawab tantangan daerah, antara lain tingginya angka kemiskinan, afirmasi terhadap kaum rentan, disparitas pembangunan antarwilayah, masih rendahnya kualitas pelayanan dasar, serta kebutuhan akan sistem tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran “*Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*” dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai arah pembangunan daerah. Reformasi birokrasi ditempatkan sebagai fondasi utama guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi instrumen penggerak dalam pencapaian visi pembangunan Provinsi Gorontalo “Gorontalo Maju dan Sejahtera”.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Keterkaitan sasaran ini dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 tercermin pada misi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif, serta mengedepankan profesionalisme aparatur. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah, serta penyederhanaan proses pelayanan publik agar semakin dekat, cepat, dan berpihak kepada masyarakat.akuntabilitas, manajemen SDM, serta penerapan digitalisasi layanan pemerintahan.

Dengan pencapaian kedua sasaran tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua ini sejalan dengan semangat pembangunan Provinsi Gorontalo yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk lebih jelas keselarasan antara tujuan Sasaran Renstra PD dan RPJMD bisa di lihat di tabel di bawah ini :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.48.0000 - Sekretariat Daerah											
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi General (Indeks)	70,25	70,25	71,25	72,25	73,25	74,25	75,25	
		Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Bina Mental Spiritual (%)	80	80	80	85	90	100	100	
			Cakupan Akses Kebijakan Layanan Dasar (%)	80	80	80	85	90	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Indeks)	90,41(Hijau,AKualitastertinggi)	90,41(Hijau,AKualitastertinggi)	90,51(Hijau,AKualitastertinggi)	90,61(Hijau,AKualitastertinggi)	90,71(Hijau,AKualitastertinggi)	90,81(Hijau,AKualitastertinggi)	90,91(Hijau,AKualitastertinggi)	
			Nilai Akip Pemda (Nilai)	68,88(B-Baik)	68,88(B-Baik)	69,88(B-Baik)	70,05(B-Baik)	70,08(B-Baik)	70,15(B-Baik)	71,00(BB-SangatBaik)	
			Indeks Berakhlak Pemda (Indeks)	75,02(Sehat)	75,02(Sehat)	75,04(Sehat)	75,06(Sehat)	75,08(Sehat)	75,10(Sehat)	75,12(Sehat)	
			Indeks Kualitas Kebijakan Publik (Indeks)	50	50	55	57	57,5	80	80,6	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	69,96	71	71,5	72,5	75	77,5	80	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	48(sangattinggi)	48(sangattinggi)	49(sangattinggi)	50(sangattinggi)	51(sangattinggi)	52(sangattinggi)	53(sangattinggi)	
Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda (Indeks)	86,6	86,6	86,75	87	87,5	88	88,5	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	B	B	A	A	A	A	A	
Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian, SDA, BUMD, BLUD dan Administrasi Pembangunan Yang Ditindaklanjuti (%)	-	80	85	90	95	100	100	
Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Nilai)	3 (telah menetapkan sistim kerja)	3 (telah menetapkan sistim kerja)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	
Predikat PPD (Predikat)	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	3.41-4.20	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029, Setda menetapkan sejumlah strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini disusun agar selaras dengan sasaran prioritas RPJMD Provinsi Gorontalo dan mampu menjawab tantangan pemerintahan di era transformasi digital dan perubahan sosial yang dinamis beberapa strategi yang bisa di ambil yg menjadi perwakilan dari tugas dan fungsi masing-masing Biro antara lain:

➤ Strategi Perluasan Akses Cakupan Layanan Dasar

Untuk mendukung sasaran Kebijakan Kesejahteraan Rakyat diperlukan beberapa strategi yang di ampuh oleh Setda yang berfokus pada : Fasilitas Bina Mental Spiritual dan Kebijakan Layanan Dasar

peran agama dalam pembangunan daerah, Setda akan mengembangkan pola pembinaan yang terstruktur dan kolaboratif dengan lembaga keagamaan. Strategi ini mencakup fasilitasi kegiatan keagamaan lintas umat, dukungan kelembagaan, serta integrasi nilai-nilai spiritual dalam kebijakan pembangunan, guna memperkuat moralitas sosial, harmoni antar umat, dan ketahanan budaya lokal.

Dalam mendukung layanan dasar pada Sekretariat Daerah diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia, Setda mendorong pengembangan mekanisme bantuan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta mahasiswa berprestasi, penyandang Disabilitas dan dukungan penerima manfaat untuk penyetaraan Gender. Strategi ini juga melibatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi di Provinsi Gorontalo.

➤ Strategi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Pemerintahan

Untuk meningkatkan integritas dan adaptivitas tata kelola pelayanan publik, Setda menitikberatkan pada reformasi struktural dan kultural birokrasi, termasuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur. Strategi ini mendukung terciptanya birokrasi yang melayani, berorientasi hasil, dan bebas dari praktik korupsi.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Melalui strategi-strategi tersebut, Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pusat koordinasi pemerintahan yang strategis, Melalui strategi-strategi tersebut, Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pusat koordinasi pemerintahan yang strategis, menjembatani kebijakan lintas sektor, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Strategi ini sekaligus menjadi instrumen utama dalam memastikan keterpaduan antara tujuan Renstra Setda dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029 Untuk Lebih jelasnya Strategi ini Bisa dilihat pada Penahapan Pembangunan Tahunan di tabel bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Rentra Sekretariat Daerah Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya melalui fasilitasi bina mental spritual	pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya melalui fasilitasi bina mental spritual	pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya melalui fasilitasi bina mental spritual	pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya melalui fasilitasi bina mental spritual	pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya melalui fasilitasi bina mental spritual
Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan melalui kebijakan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan melalui kebijakan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan melalui kebijakan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan melalui kebijakan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan melalui kebijakan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar
Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





daerah dan Kerjasama Daerah	daerah dan Kerjasama Daerah	daerah dan Kerjasama Daerah	daerah dan Kerjasama Daerah	daerah dan Kerjasama Daerah
Penguatan Tata Kelola dalam Proses Penyusunan Rekomendasi kebijakan	Penguatan Tata Kelola dalam Proses Penyusunan Rekomendasi kebijakan	Penguatan Tata Kelola dalam Proses Penyusunan Rekomendasi kebijakan	Penguatan Tata Kelola dalam Proses Penyusunan Rekomendasi kebijakan	Penguatan Tata Kelola dalam Proses Penyusunan Rekomendasi kebijakan
Peningkatan Kematangan UKPBJ	Peningkatan Kematangan UKPBJ	Peningkatan Kematangan UKPBJ	Peningkatan Kematangan UKPBJ	Peningkatan Kematangan UKPBJ
Peningkatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Peningkatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Peningkatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Peningkatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Peningkatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Peningkatan SDM, & Manajemen Kinerja	Peningkatan SDM, & Manajemen Kinerja	Peningkatan SDM, & Manajemen Kinerja	Peningkatan SDM, & Manajemen Kinerja	Peningkatan SDM, & Manajemen Kinerja
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan tata laksana pemerintahan	Peningkatan tata laksana pemerintahan	Peningkatan tata laksana pemerintahan	Peningkatan tata laksana pemerintahan	Peningkatan tata laksana pemerintahan
Peningkatan,P enguatan dan Percepatan Implementasi RB	Peningkatan,P enguatan dan Percepatan Implementasi RB	Peningkatan,P enguatan dan Percepatan Implementasi RB	Peningkatan,P enguatan dan Percepatan Implementasi RB	Peningkatan,P enguatan dan Percepatan Implementasi RB

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi sarana prasarana, perencanaan kebutuhan yang berbasis data, penguatan manajemen SDM aparatur, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi sarana prasarana, perencanaan kebutuhan yang berbasis data, penguatan manajemen SDM aparatur, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi sarana prasarana, perencanaan kebutuhan yang berbasis data, penguatan manajemen SDM aparatur, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi sarana prasarana, perencanaan kebutuhan yang berbasis data, penguatan manajemen SDM aparatur, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi sarana prasarana, perencanaan kebutuhan yang berbasis data, penguatan manajemen SDM aparatur, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas
---	---	---	---	---

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam periode Renstra 2025–2029 difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” dan mendukung langsung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo, khususnya dalam bidang reformasi birokrasi, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Secara garis besar, arah kebijakan yang diambil Setda mencakup:

- 1) Penguatan Peran Strategis Lembaga Keagamaan dalam Pembangunan Moral dan Sosial Melalui kebijakan pembinaan spiritual dan dukungan kelembagaan keagamaan, Setda memperkuat peran agama sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkarakter dan harmonis.
- 2) Peningkatan Akses dan Kesenjangan fasilitas layanan dasar bagi Masyarakat, Kebijakan ini diarahkan pada pemberian bantuan pendidikan yang lebih merata, terarah, dan akuntabel guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif.
- 3) Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif Fokus kebijakan berada pada transformasi struktur dan budaya birokrasi, penguatan sistem kerja digital, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur.
- 4) Optimalisasi Fungsi Penunjang Pemerintahan Melalui Modernisasi Layanan Administratif Arah kebijakan ini mendukung terwujudnya layanan kesekretariatan dan fasilitas pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Seluruh kebijakan ini ditempuh dalam kerangka mendorong pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera”, dengan menekankan pentingnya birokrasi yang responsif terhadap perubahan, partisipatif dalam proses pembangunan, dan mampu menjalankan peran strategis sebagai pelayan publik yang andal dan terpercaya. Arah kebijakan Setda juga menjadi fondasi kuat untuk membangun pemerintahan daerah yang bersih, inklusif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara dinamis dan berkelanjutan. Untuk Lebih Jelas Keselarasan Antara Arah Kebijakan Renstra PD dan RPJMD bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

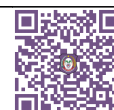
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.5 Perumusan Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo tahun 2025-2030

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
Biro Pemerintahan dan Kesra				
		Penguatan kualitas dan manajemen pendidikan vokasi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah	Peningkatan Akses bantuan layanan dasar	
		Dukungan terhadap pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan diantaranya pembangunan Islamic Center Provinsi Gorontalo.	Dukungan fasilitasi sarana prasarana Bina Mental Spritual	
		Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah serta pengawasan pembangunan daerah.	Fasilitasi Tugas Pemerintahan, otonomi daerah dan Kerjasama Daerah	
Biro Hukum				
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan kompetensi SDM	Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung kinerja kualitas pelayanan publik	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan SOP, Proses Bisnis, Arsitektur Proses Bisnis, arsitektur layanan, dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
		Meningkatkan Sistem dan standarisasi kerja yang optimal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui efektivitas dan perbaikan pelayanan sesuai pengembangan prosedur kerja standar (SOP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Fasilitasi Penerapan aspek Pelayanan Publik dengan kategori baik bagi seluruh Perangkat Daerah	
		Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah dan mendorong pembinaan ke pemerintah kabupaten dan kota melalui Penerapan model pendekatan koersif atau model normatif-reedukatif	Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi baik RB general maupun RB tematik serta manajemen akuntabilitas dengan kategori baik	
Biro Ekonomi dan Pembangunan				
		Meningkatkan kualitas pengendalian ekonomi dan pembangunan	Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak dan efektivitas rekomendasi kebijakan yang telah diimplementasikan	
Biro Pengadaan				
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kematangan UKPBJ dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Biro Organisasi				
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan kompetensi SDM	Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung kinerja kualitas pelayanan publik	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan SOP, Proses Bisnis, Arsitektur Proses Bisnis, arsitektur layanan, dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
		Meningkatkan Sistem dan standarisasi kerja yang optimal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui efektivitas dan perbaikan pelayanan sesuai pengembangan prosedur kerja standar (SOP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Fasilitasi Penerapan aspek Pelayanan Publik dengan kategori baik bagi seluruh Perangkat Daerah	
		Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah dan mendorong pembinaan ke pemerintah kabupaten dan kota melalui Penerapan model pendekatan koersif atau model normatif-re edukatif	Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi baik RB general maupun RB tematik serta manajemen akuntabilitas dengan kategori baik	
Biro Umum				
		Meningkatkan Sistem dan standarisasi kerja yang optimal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui efektivitas dan perbaikan pelayanan sesuai pengembangan prosedur kerja standar (SOP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Organisasi	
			Peningkatan Kualitas Perencana Barang Milik Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





			Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan Distribusi Sumber Daya Aparatur	
			Penanaman Budaya Kerja yang Efektif, Efisien, dan Disiplin di Lingkungan OPD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Uraian Program Sekretariat Daerah

- **Program Kesejahteraan Rakyat**
- **Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**
- **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
- **Program Perekonomian Dan Pembangunan**

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- **Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**
- **Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**
- **Program Penataan Organisasi**
- **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

2. Uraian Kegiatan Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - b. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
 - c. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual.
- 2) Program pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
 - c. Fasilitas Kerjasama Daerah.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Biro Hukum

1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan
 - b. Fasilitas Bantuan Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam; dan
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;

2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pengadaan barang Milik Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Biro Organisasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
- b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

g. Biro Umum

1. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- j. Fasilitasi Keprotokolan;
- k. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- l. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					86.999.619.823		101.235.437.748		105.889.897.092		111.404.735.831		116.678.903.965		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					68.556.963.930		73.705.100.810		76.500.286.237		80.195.672.241		83.907.980.489		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Ekbang)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	80	80	3.879.363.100	95	4.563.320.757	100	5.039.623.342	100	5.557.397.562	100	6.127.064.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Organisasi)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	80	80	4.526.992.396	85	5.871.184.683	90	6.311.523.534	100	6.784.887.799	100	7.293.754.384	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro PBJ)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	80	80	7.087.712.628	85	7.376.668.000	90	7.563.441.600	95	7.849.929.920	100	7.938.715.904	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Pemkesra)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.480.919.606	100	6.538.154.322	100	6.865.062.038	100	7.208.315.140	100	7.568.730.897	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Biro Umum)	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	80	80	43.000.000.000	85	44.277.023.048	90	46.236.885.723	100	48.288.391.820	100	50.435.964.768	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya Layanan Penunjang urusan Pemerintah (Biro Hukum)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	80	80	4.581.976.200	85	5.078.750.000	90	4.483.750.000	100	4.506.750.000	100	4.543.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					973.007.604		1.652.482.768		1.776.418.976		1.909.650.399		2.052.874.179		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Meningkatnya Tata Kelola organisasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	72,23	75	77,23	973.007.604	79,63	1.652.482.768	81,53	1.776.418.976	83,21	1.909.650.399	85,01	2.052.874.179	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD yang telah mengimplemtasikan RB > Baik (%)	87,77	88	88,5		89,2		90,01		92,2		93,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80) (%)	70,01	71	72,74		74,62		76,52		80,01		82,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik (%)	13,79	17,24	24,14		34,48		51,72		68,97		86,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis (%)	86,57	86,92	87,99		89,05		90,11		91,17		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat (%)	74,7	75	75,2		75,7		76,2		76,7		77,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					963.128.901		2.340.711.425		2.457.746.996		2.580.634.346		2.709.666.063	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu (%)	100	100	100	963.128.901	100	2.340.711.425	100	2.457.746.996	100	2.580.634.346	100	2.709.666.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.439.050.188		19.725.422.010		20.711.693.111		21.747.277.766		22.834.641.654	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Meningkatnya Fasilitas Bina Mental Spritual dan Akses Bantuan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	80	80	13.439.050.188	85	19.725.422.010	90	20.711.693.111	100	21.747.277.766	100	22.834.641.654	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Fasilitas Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar (%)	86	80	80		85		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					1.418.023.800		1.510.000.000		1.544.000.000		1.575.000.000		1.612.000.000	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Penyelenggara pemerintah Dan Masyarakat Miskin	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi (%)	100	100	100	1.418.023.800	100	1.510.000.000	100	1.544.000.000	100	1.575.000.000	100	1.612.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					726.286.400		1.046.171.673		1.348.415.630		1.539.406.353		1.591.192.518	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	726.286.400	100	1.046.171.673	100	1.348.415.630	100	1.539.406.353	100	1.591.192.518	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					528.808.500		620.000.000		760.454.720		906.545.664		1.020.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)	5 (9/9 Pro aktif)	5-5 (9/9 Pro aktif)	5-5 (9/9 Pro aktif)	528.808.500	6-6 (UKPBJ- PKP)	620.000.000	7-7 (1/9 Strategis)	760.454.720	7-7 (2/9 Strategis)	906.545.664	7-7 (3/9 Strategis)	1.020.000.000	1-2 : Inisiasi 3-4 : Esensi 5-5 : Pro Aktif 6-6 : UKPBJ PKP 7-8 : Strategis 9-10 : Unggul
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					394.350.500		635.549.062		790.881.422		950.549.062		950.549.062	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100	394.350.500	100	635.549.062	100	790.881.422	100	950.549.062	100	950.549.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					86,999,619,823.00		101,235,437,748.00		105,889,897,092.00		111,404,735,831.00		116,678,903,965.00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Bisa Dilihat Pada Tabel Di Bawah:

TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.48.0042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Fasilitas Bina Mental Spritual dan Akses Bantuan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar		Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Fasilitas Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar (%)	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Jumlah Lembaga Bina Mental Spritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01 - Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01 - Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	
					Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	
				Jumlah Dokumen Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	4.01.04.1.02 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	4.01.04.1.02.0001 - Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



						Pendidikan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Pemkesra)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



				Daerah			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu (%)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
					Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu (%)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
					Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01.0002 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01.0003 - Fasilitas Penataan Wilayah	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02.0001 - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02.0004 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Dokumen Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
					4.01.0.00.0.00.48.0043 - Biro Hukum			
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Layanan Penunjang urusan Pemerintah (Biro Hukum)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang di Adakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang di dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Penyelenggara pemerintah Dan Masyarakat Miskin		Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi (%)	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	Penetapan 4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004 - Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
4.01.0.00.0.00.48.0044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan							
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Peresentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0001 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	
					Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
				Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Terkendalinya Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	
				Tersusunnya Jumlah Dokumen hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Ekbang)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
					Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4.01.0.00.0.00.48.0045 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro PBJ)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Kendaraan dinas, mebel dan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat kematangan UKPBJ (Level)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				Terselenggaranya Strategi, Pelaksanaan dan Monev Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Layanan SPSE, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pendampingan, Pembinaan kelembagaan dan SDM, serta Advokasi PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.48.0046 - Biro Organisasi							
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Organisasi)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya Tata Kelola organisasi Pemerintah Daerah		Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
					Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
					Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80) (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
					Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
					Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
					Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



				terlaksananya fasilitasi Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02.0005 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	
4.01.0.00.0.00.48.0047 - Biro Umum							
- Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Biro Umum)		Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14.0001 - Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14.0002 - Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				86.999.619.823		101.235.437.748		105.889.897.092		111.404.735.831		116.678.903.965		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				68.556.963.930		73.705.100.810		76.500.286.237		80.195.672.241		83.907.980.489		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Ekbang)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	80	3.879.363.100	95	4.563.320.757	100	5.039.623.342	100	5.557.397.562	100	6.127.064.536	4.01.0.00.0.00.48.0 044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98.616.703		108.652.373		119.466.410		131.408.551		144.973.873		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	98.616.703	1	108.652.373	1	119.466.410	1	131.408.551	1	144.973.873		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				96.876.703		106.564.373		117.220.810		128.942.891		141.837.180		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	96.876.703	8	106.564.373	8	117.220.810	8	128.942.891	8	141.837.180		
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				870.000		1.044.000		1.045.000		1.145.000		1.750.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	870.000	2	1.044.000	2	1.045.000	2	1.145.000	2	1.750.000		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				870.000		1.044.000		1.200.600		1.320.660		1.386.693		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	870.000	1	1.044.000	1	1.200.600	1	1.320.660	1	1.386.693		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.981.746.721		3.288.624.391		3.617.969.832		3.980.322.265		4.378.993.260		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	2.981.746.721	1	3.288.624.391	1	3.617.969.832	1	3.980.322.265	1	4.378.993.260		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	28	28		28		28		28					
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.980.876.721		3.278.964.391		3.606.860.832		3.967.546.915		4.364.301.607		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	28	28	2.980.876.721	28	3.278.964.391	28	3.606.860.832	28	3.967.546.915	28	4.364.301.607		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				870.000		9.660.000		11.109.000		12.775.350		14.691.653		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	870.000	1	9.660.000	1	11.109.000	1	12.775.350	1	14.691.653		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.773.000		77.640.100		89.286.115		92.428.789		94.157.259		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	22.773.000	1	77.640.100	1	89.286.115	1	92.428.789	1	94.157.259		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	16		16		16		16		16			
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		50.312.500		57.859.375		57.859.375		57.859.375		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	1	50.312.500	1	57.859.375	1	57.859.375	1	57.859.375		
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				22.773.000		27.327.600		31.426.740		34.569.414		36.297.884		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	16	22.773.000	16	27.327.600	16	31.426.740	16	34.569.414	16	36.297.884		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.633.500		228.396.850		251.929.220		278.207.782		307.277.047		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	207.633.500	2	228.396.850	2	251.929.220	2	278.207.782	2	307.277.047		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.372.000		19.109.200		21.712.805		24.969.726		28.715.185		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.372.000	1	19.109.200	1	21.712.805	1	24.969.726	1	28.715.185		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				172.521.500		189.773.650		208.751.015		229.626.116		252.588.728		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	172.521.500	15	189.773.650	15	208.751.015	15	229.626.116	15	252.588.728		
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17.740.000		19.514.000		21.465.400		23.611.940		25.973.134		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	17.740.000	2	19.514.000	2	21.465.400	2	23.611.940	2	25.973.134		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.328.000		289.270.350		332.660.903		382.560.038		439.944.044		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	6	49.328.000	6	289.270.350	6	332.660.903	6	382.560.038	6	439.944.044		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		45.000.000		51.750.000		59.512.500		68.439.375		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	45.000.000	1	51.750.000	1	59.512.500	1	68.439.375		
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.328.000		244.270.350		280.910.903		323.047.538		371.504.669		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	6	49.328.000	6	244.270.350	6	280.910.903	6	323.047.538	6	371.504.669		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				407.600.176		448.360.193		493.196.212		542.515.834		596.767.417		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	407.600.176	1	448.360.193	1	493.196.212	1	542.515.834	1	596.767.417		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.602.000		62.262.200		68.488.420		75.337.262		82.870.988		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	56.602.000	1	62.262.200	1	68.488.420	1	75.337.262	1	82.870.988		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.998.176		386.097.993		424.707.792		467.178.572		513.896.429		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	350.998.176	1	386.097.993	1	424.707.792	1	467.178.572	1	513.896.429		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.665.000		122.376.500		135.114.650		149.954.303		164.951.636		
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	111.665.000	15	122.376.500	15	135.114.650	15	149.954.303	15	164.951.636		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7		7		7		7		7			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				87.075.000		95.782.500		105.360.750		115.896.825		127.486.507		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	87.075.000	3	95.782.500	3	105.360.750	3	115.896.825	3	127.486.507		
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		12.100.000		13.310.000		15.969.188		17.166.877		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	11.000.000	7	12.100.000	7	13.310.000	7	15.969.188	7	17.166.877		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.590.000		14.494.000		16.443.900		18.088.290		20.298.252		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	13.590.000	15	14.494.000	15	16.443.900	15	18.088.290	15	20.298.252		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Organisasi)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	80	4.526.992.396	85	5.871.184.683	90	6.311.523.534	100	6.784.887.799	100	7.293.754.384	4.01.0.00.0.00.48.0 046 - Biro Organisasi	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98.981.000		335.963.965		361.161.263		388.248.358		417.366.984		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8 Lap	8 Lap	98.981.000	8 Lap	335.963.965	8 Lap	361.161.263	8 Lap	388.248.358	8 Lap	417.366.984		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 dok	5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				98.981.000		174.713.965		187.817.513		201.903.827		217.046.613		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 dok	5 dok	98.981.000	5 dok	174.713.965	5 dok	187.817.513	5 dok	201.903.827	5 dok	217.046.613		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		161.250.000		173.343.750		186.344.531		200.320.371		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8 Lap	8 Lap	0	8 Lap	161.250.000	8 Lap	173.343.750	8 Lap	186.344.531	8 Lap	200.320.371		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.577.617.101		3.932.912.247		4.227.880.665		4.544.971.715		4.885.844.593		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25 orang	25 orang	3.577.617.101	25 orang	3.932.912.247	25 orang	4.227.880.665	25 orang	4.544.971.715	25 orang	4.885.844.593		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan			
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.516.613.101		3.810.554.672		4.096.346.272		4.403.572.242		4.733.840.160		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25 orang	25 orang	3.516.613.101	25 orang	3.810.554.672	25 orang	4.096.346.272	25 orang	4.403.572.242	25 orang	4.733.840.160		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				61.004.000		122.357.575		131.534.393		141.399.473		152.004.433		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	61.004.000	6 Laporan	122.357.575	6 Laporan	131.534.393	6 Laporan	141.399.473	6 Laporan	152.004.433		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		376.250.000		404.468.750		434.803.906		467.414.199		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	41 Paket	30.000.000	41 Paket	376.250.000	41 Paket	404.468.750	41 Paket	434.803.906	41 Paket	467.414.199		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5 orang	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000	0		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	41 Paket	30.000.000	41 Paket	0	41 Paket	0	41 Paket	0	41 Paket	0	
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		376.250.000		404.468.750		434.803.906		467.414.199	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5 orang	5 orang	0	5 orang	376.250.000	5 orang	404.468.750	5 orang	434.803.906	5 orang	467.414.199	
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				350.402.000		510.657.250		548.956.544		590.128.284		634.387.906	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3 lap	3 Lap	350.402.000	3 Lap	510.657.250	3 Lap	548.956.544	3 Lap	590.128.284	3 Lap	634.387.906	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				228.990.000		241.907.250		260.050.294		279.554.066		300.520.621	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	3 paket	228.990.000	3 paket	241.907.250	3 paket	260.050.294	3 paket	279.554.066	3 paket	300.520.621	
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121.412.000		268.750.000		288.906.250		310.574.218		333.867.285	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3 lap	3 Lap	121.412.000	3 Lap	268.750.000	3 Lap	288.906.250	3 Lap	310.574.218	3 Lap	333.867.285	
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2 Unit	0	4 unit	30.000.000	6 Unit	30.000.000	8 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2 Unit	0	4 unit	30.000.000	6 Unit	30.000.000	8 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				469.992.295		685.401.221		739.056.312		796.735.536		858.740.702	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	469.992.295	6 Laporan	685.401.221	6 Laporan	739.056.312	6 Laporan	796.735.536	6 Laporan	858.740.702	
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				469.992.295		685.401.221		739.056.312		796.735.536		858.740.702	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	469.992.295	6 Laporan	685.401.221	6 Laporan	739.056.312	6 Laporan	796.735.536	6 Laporan	858.740.702	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro PBJ)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	80	7.087.712.628	85	7.376.668.000	90	7.563.441.600	95	7.849.929.920	100	7.938.715.904	4.01.0.00.0.00.48.0 045 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				119.027.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4	119.027.000	4	160.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	4	190.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				115.837.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4	115.837.000	4	120.000.000	4	125.000.000	4	130.000.000	4	135.000.000		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.190.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	3.190.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.195.077.680		6.200.000.000		6.250.000.000		6.300.000.000		6.350.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35	35	6.195.077.680	35	6.200.000.000	37	6.250.000.000	37	6.300.000.000	38	6.350.000.000		
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.195.077.680		6.200.000.000		6.250.000.000		6.300.000.000		6.350.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	35	35	6.195.077.680	35	6.200.000.000	37	6.250.000.000	37	6.300.000.000	38	6.350.000.000		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.534.000		70.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	17.534.000	10	70.000.000	10	90.000.000	10	110.000.000	10	130.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000		30.000.000		45.000.000		60.000.000		75.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	15.000.000	2	30.000.000	2	45.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000		
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.534.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	2.534.000	10	40.000.000	10	45.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.080.500		178.800.000		281.000.000		301.000.000		321.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2	96.080.500	2	178.800.000	2	281.000.000	2	301.000.000	2	321.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.430.500		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	6.430.500	3	20.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000		
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				51.000.000		61.000.000		71.000.000		81.000.000		91.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	3	51.000.000	3	61.000.000	3	71.000.000	3	81.000.000	3	91.000.000		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.650.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	2	38.650.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		52.800.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	52.800.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				121.188.000		180.000.000		160.000.000		320.000.000		280.000.000		
Tersedianya Kendaraan dinas, mebel dan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	121.188.000	3	180.000.000	3	160.000.000	3	320.000.000	3	280.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		0			

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.000.000		80.000.000		0		100.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	78.000.000	1	80.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0		
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.188.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	43.188.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				470.995.448		500.000.000		515.000.000		530.000.000		545.000.000		
Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	470.995.448	1	500.000.000	1	515.000.000	1	530.000.000	1	545.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.480.500		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	60.480.500	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				410.514.948		420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	410.514.948	1	420.000.000	1	430.000.000	1	440.000.000	1	450.000.000		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.810.000		87.868.000		97.441.600		108.929.920		122.715.904		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	4	67.810.000	4	87.868.000	4	97.441.600	4	108.929.920	4	122.715.904		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5		5		5		5		5			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.160.000		64.000.000		68.800.000		74.560.000		81.472.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	4	56.160.000	4	64.000.000	4	68.800.000	4	74.560.000	4	81.472.000		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.650.000		23.868.000		28.641.600		34.369.920		41.243.904		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	11.650.000	5	23.868.000	5	28.641.600	5	34.369.920	5	41.243.904		

Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Biro Pemkesra)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	5.480.919.606	100	6.538.154.322	100	6.865.062.038	100	7.208.315.140	100	7.568.730.897	4.01.0.00.0.00.48.0 042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.385.000		233.100.000		244.755.000		256.992.750		269.842.388		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	57.385.000	7	233.100.000	7	244.755.000	7	256.992.750	7	269.842.388		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				57.385.000		233.100.000		244.755.000		256.992.750		269.842.388		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	57.385.000	7	233.100.000	7	244.755.000	7	256.992.750	7	269.842.388		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.649.617.658		4.881.486.546		5.125.560.874		5.381.838.917		5.650.930.863		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29	26	4.649.617.658	26	4.881.486.546	26	5.125.560.874	26	5.381.838.917	26	5.650.930.863		
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.649.617.658		4.881.486.546		5.125.560.874		5.381.838.917		5.650.930.863		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29	26	4.649.617.658	26	4.881.486.546	26	5.125.560.874	26	5.381.838.917	26	5.650.930.863		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		176.400.000		185.220.000		194.481.000		204.205.050		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	0	0	10	176.400.000	10	185.220.000	10	194.481.000	10	204.205.050		
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		176.400.000		185.220.000		194.481.000		204.205.050		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	0	0	10	176.400.000	10	185.220.000	10	194.481.000	10	204.205.050		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.118.000		700.801.500		735.841.575		772.633.654		811.265.336		
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	302.118.000	4	700.801.500	4	735.841.575	4	772.633.654	4	811.265.336		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				302.118.000		700.801.500		735.841.575		772.633.654		811.265.336		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	302.118.000	4	700.801.500	4	735.841.575	4	772.633.654	4	811.265.336		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				471.798.948		546.366.276		573.684.589		602.368.819		632.487.260		
Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	471.798.948	1	546.366.276	1	573.684.589	1	602.368.819	1	632.487.260		
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				471.798.948		546.366.276		573.684.589		602.368.819		632.487.260		

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	471.798.948	1	546.366.276	1	573.684.589	1	602.368.819	1	632.487.260		
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Biro Umum)	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	80	43.000.000.000	85	44.277.023.048	90	46.236.885.723	100	48.288.391.820	100	50.435.964.768	4.01.0.00.0.00.48.0 047 - Biro Umum	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				119.192.000		125.151.600		131.409.180		137.979.639		144.878.621		
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	5	119.192.000	5	125.151.600	5	131.409.180	5	137.979.639	5	144.878.621		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				68.792.000		72.231.600		75.843.180		79.635.339		83.617.106		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	5	68.792.000	5	72.231.600	5	75.843.180	5	79.635.339	5	83.617.106		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.400.000		52.920.000		55.566.000		58.344.300		61.261.515		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	50.400.000	3	52.920.000	3	55.566.000	3	58.344.300	3	61.261.515		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.948.253.068		10.252.688.768		10.511.334.730		10.776.563.277		11.048.544.798		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	65	10.948.253.068	70	10.252.688.768	75	10.511.334.730	80	10.776.563.277	85	11.048.544.798		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.859.539.068		10.159.539.068		10.413.527.545		10.673.865.733		10.940.712.377		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	75	65	10.859.539.068	70	10.159.539.068	75	10.413.527.545	80	10.673.865.733	85	10.940.712.377		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				88.714.000		93.149.700		97.807.185		102.697.544		107.832.421		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	88.714.000	1	93.149.700	1	97.807.185	1	102.697.544	1	107.832.421		
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				117.064.700		142.917.935		150.063.832		157.567.023		165.445.375		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	117.064.700	1	142.917.935	1	150.063.832	1	157.567.023	1	165.445.375		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500		
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				117.064.700		122.917.935		129.063.832		135.517.023		142.292.875		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	117.064.700	1	122.917.935	1	129.063.832	1	135.517.023	1	142.292.875		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				137.885.980		169.780.279		178.269.293		187.182.758		196.541.895		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55	137.885.980	56	169.780.279	57	178.269.293	58	187.182.758	60	196.541.895		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		21		22		23		24			
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55	0	56	25.000.000	57	26.250.000	58	27.562.500	60	28.940.625		
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				137.885.980		144.780.279		152.019.293		159.620.258		167.601.270		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	137.885.980	21	144.780.279	22	152.019.293	23	159.620.258	24	167.601.270		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.869.921.000		2.063.417.050		2.166.587.903		2.274.917.298		2.388.663.163		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.869.921.000	1	2.063.417.050	1	2.166.587.903	1	2.274.917.298	1	2.388.663.163		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	23		24		25		26		26			

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.869.921.000		1.963.417.050		2.061.587.903		2.164.667.298		2.272.900.663		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	23	1.869.921.000	24	1.963.417.050	25	2.061.587.903	26	2.164.667.298	26	2.272.900.663		
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		
Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	150.000.000	4	157.500.000	5	165.375.000	6	173.643.750		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		9		10		11		12			
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250		
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	50.000.000	4	52.500.000	5	55.125.000	6	57.881.250		
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	9	50.000.000	10	52.500.000	11	55.125.000	12	57.881.250		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.761.211.594		1.849.272.174		1.941.735.782		2.038.822.572		2.140.763.700		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.761.211.594	1	1.849.272.174	1	1.941.735.782	1	2.038.822.572	1	2.140.763.700		
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.761.211.594		1.849.272.174		1.941.735.782		2.038.822.572		2.140.763.700		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.761.211.594	1	1.849.272.174	1	1.941.735.782	1	2.038.822.572	1	2.140.763.700		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.596.043.790		3.800.845.980		3.990.888.278		4.190.432.692		4.399.954.327		
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	3.596.043.790	8	3.800.845.980	8	3.990.888.278	8	4.190.432.692	8	4.399.954.327		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	22											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8											

4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.127.010.000		1.183.360.500		1.242.528.525		1.304.654.951		1.369.887.699		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	22	1.127.010.000	22	1.183.360.500	22	1.242.528.525	22	1.304.654.951	22	1.369.887.699		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	8	25.000.000	8	26.250.000	8	27.562.500	8	28.940.625		
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.469.033.790		2.592.485.480		2.722.109.753		2.858.215.241		3.001.126.003		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	2.469.033.790	8	2.592.485.480	8	2.722.109.753	8	2.858.215.241	8	3.001.126.003		
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.066.876.510		2.170.220.336		2.278.731.352		2.392.667.920		2.512.301.317		
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2.066.876.510	2	2.170.220.336	2	2.278.731.352	2	2.392.667.920	2	2.512.301.317		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	2											
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2											
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2											
4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				323.676.510		339.860.336		356.853.352		374.696.020		393.430.821		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	323.676.510	2	339.860.336	2	356.853.352	2	374.696.020	2	393.430.821		
4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				393.200.000		412.860.000		433.503.000		455.178.150		477.937.058		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	2	393.200.000	2	412.860.000	2	433.503.000	2	455.178.150	2	477.937.058		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625		
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.250.000.000		1.312.500.000		1.378.125.000		1.447.031.250		1.519.382.813		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	1.250.000.000	2	1.312.500.000	2	1.378.125.000	2	1.447.031.250	2	1.519.382.813		
4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				21.493.044.858		22.567.697.101		23.696.081.956		24.880.886.054		26.124.930.356		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	21.493.044.858	12	22.567.697.101	12	23.696.081.956	12	24.880.886.054	12	26.124.930.356		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				6.312.948.304		6.628.595.719		6.960.025.505		7.308.026.780		7.673.428.119		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	6.312.948.304	12	6.628.595.719	12	6.960.025.505	12	7.308.026.780	12	7.673.428.119		
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				5.973.579.500		6.272.258.475		6.585.871.399		6.915.164.969		7.260.923.217		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	5.973.579.500	12	6.272.258.475	12	6.585.871.399	12	6.915.164.969	12	7.260.923.217		
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				9.206.517.054		9.666.842.907		10.150.185.052		10.657.694.305		11.190.579.020		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	9.206.517.054	12	9.666.842.907	12	10.150.185.052	12	10.657.694.305	12	11.190.579.020		
4.01.01.1.13 - Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250		
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	1	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250		
4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan				890.506.500		935.031.825		981.783.417		1.030.872.587		1.082.416.216		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	1	1	890.506.500	1	935.031.825	1	981.783.417	1	1.030.872.587	1	1.082.416.216		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.14.0001 - Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				436.031.500		457.833.075		480.724.729		504.760.965		529.999.013		
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	1	1	436.031.500	1	457.833.075	1	480.724.729	1	504.760.965	1	529.999.013		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.14.0002 - Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				214.249.000		224.961.450		236.209.523		248.019.999		260.420.999		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	1	1	214.249.000	1	224.961.450	1	236.209.523	1	248.019.999	1	260.420.999		
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				240.226.000		252.237.300		264.849.165		278.091.623		291.996.204		
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	1	1	240.226.000	1	252.237.300	1	264.849.165	1	278.091.623	1	291.996.204		
Meningkatnya Layanan Penunjang urusan Pemerintah (Biro Hukum)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	80	4.581.976.200	85	5.078.750.000	90	4.483.750.000	100	4.506.750.000	100	4.543.750.000	4.01.0.00.0.00.48.0 043 - Biro Hukum	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				201.498.000		206.000.000		212.000.000		219.000.000		225.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	201.498.000	2	206.000.000	2	212.000.000	2	219.000.000	2	225.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				77.130.000		78.000.000		80.000.000		82.000.000		84.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	77.130.000	2	78.000.000	2	80.000.000	2	82.000.000	2	84.000.000		
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				57.213.000		59.000.000		61.000.000		64.000.000		66.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	57.213.000	2	59.000.000	2	61.000.000	2	64.000.000	2	66.000.000		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.155.000		69.000.000		71.000.000		73.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	67.155.000	4	69.000.000	4	71.000.000	4	73.000.000	4	75.000.000		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.378.862.193		3.382.000.000		3.389.000.000		3.396.000.000		3.418.000.000		
Jumlah Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25	25	3.378.862.193	25	3.382.000.000	25	3.389.000.000	25	3.396.000.000	25	3.418.000.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.318.056.193		3.320.000.000		3.325.000.000		3.330.000.000		3.350.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25	25	3.318.056.193	25	3.320.000.000	25	3.325.000.000	25	3.330.000.000	25	3.350.000.000		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				60.806.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000		68.000.000		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	60.806.000	1	62.000.000	1	64.000.000	1	66.000.000	1	68.000.000		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.601.980		91.750.000		93.750.000		95.750.000		97.750.000		
Jumlah Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10	90.601.980	10	91.750.000	10	93.750.000	10	95.750.000	10	97.750.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	33		33		33		33		33			
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.750.000		25.750.000		25.750.000		25.750.000		25.750.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	33	25.750.000	33	25.750.000	33	25.750.000	33	25.750.000	33	25.750.000		
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				64.851.980		66.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10	64.851.980	10	66.000.000	10	68.000.000	10	70.000.000	10	72.000.000		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				380.327.527		255.000.000		256.000.000		259.000.000		262.000.000		
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	380.327.527	1	255.000.000	1	256.000.000	1	259.000.000	1	262.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.770.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.770.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				367.557.527		242.000.000		242.000.000		244.000.000		246.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	367.557.527	1	242.000.000	1	242.000.000	1	244.000.000	1	246.000.000		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				123.552.000		735.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang di Adakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	123.552.000	0	735.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5		0		0		0		0			
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				123.552.000		615.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	123.552.000	0	615.000.000	0	0	0	0	0	0		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.522.000		266.000.000		268.000.000		270.000.000		272.000.000		
Jumlah Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	264.522.000	1	266.000.000	1	268.000.000	1	270.000.000	1	272.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.522.000		16.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	14.522.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.612.500		143.000.000		145.000.000		147.000.000		149.000.000		
Jumlah Barang Milik Daerah yang di dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	6	142.612.500	6	143.000.000	6	145.000.000	6	147.000.000	6	149.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				111.877.500		112.000.000		113.000.000		114.000.000		115.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	6	111.877.500	6	112.000.000	6	113.000.000	6	114.000.000	6	115.000.000		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.735.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		34.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	12	30.735.000	12	31.000.000	12	32.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000		
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				973.007.604		1.652.482.768		1.776.418.976		1.909.650.399		2.052.874.179		
Meningkatnya Tata Kelola organisasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	72,23	77,23	973.007.604	79,63	1.652.482.768	81,53	1.776.418.976	83,21	1.909.650.399	85,01	2.052.874.179	4.01.0.00.0.00.48.0 046 - Biro Organisasi	
	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik (%)	87,77	88,5		89,2		90,01		92,2		93,01			
	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80) (%)	70,01	72,74		74,62		76,52		80,01		82,25			
	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik (%)	13,79	24,14		34,48		51,72		68,97		86,21			
	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis (%)	86,57	87,99		89,05		90,11		91,17		100			
	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat (%)	74,7	75,2		75,7		76,2		76,7		77,2			

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				351.258.000		529.323.198		569.022.438		611.699.121		657.576.555		
Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	351.258.000	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	529.323.198	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	569.022.438	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	611.699.121	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	657.576.555		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6 dokumen kab/kota	6 dokumen kab/kota		6 dokumen kab/kota		6 dokumen kab/kota		6 dokumen kab/kota		6 dokumen kab/kota			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dok (19 Perangkat Daerah)	1 Dok (22 Perangkat Daerah)		1 Dok (23 Perangkat Daerah)		1 Dok (24 Perangkat Daerah)		1 Dok (25 Perangkat Daerah)		1 Dok (26 Perangkat Daerah)			
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi				123.872.500		194.365.374		208.942.778		224.613.486		241.459.498		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dok (19 Perangkat Daerah)	1 Dok (22 Perangkat Daerah)	123.872.500	1 Dok (23 Perangkat Daerah)	194.365.374	1 Dok (24 Perangkat Daerah)	208.942.778	1 Dok (25 Perangkat Daerah)	224.613.486	1 Dok (26 Perangkat Daerah)	241.459.498		
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				80.005.000		111.286.336		119.632.811		128.605.272		138.250.667		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6 dokumen kab/kota	6 dokumen kab/kota	80.005.000	6 dokumen kab/kota	111.286.336	6 dokumen kab/kota	119.632.811	6 dokumen kab/kota	128.605.272	6 dokumen kab/kota	138.250.667		
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				147.380.500		223.671.488		240.446.849		258.480.363		277.866.390		
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	147.380.500	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	223.671.488	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	240.446.849	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	258.480.363	4 Dok. Anjab, ABK, Evjab, SKJ	277.866.390		
4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				621.749.604		1.123.159.570		1.207.396.538		1.297.951.278		1.395.297.624		
terlaksananya fasilitas Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	621.749.604	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	1.123.159.570	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	1.207.396.538	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	1.297.951.278	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	1.395.297.624		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	29 Dok	29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	3 dok	3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				132.044.004		243.437.513		261.695.326		281.322.475		302.421.661		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	29 Dok	29 Dok	132.044.004	29 Dok	243.437.513	29 Dok	261.695.326	29 Dok	281.322.475	29 Dok	302.421.661		
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				153.650.600		255.553.408		274.719.913		295.323.907		317.473.200		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	153.650.600	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	255.553.408	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	274.719.913	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	295.323.907	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 29 Dokumen SAKIP OPD)	317.473.200		
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				80.005.000		115.809.750		124.495.481		133.832.642		143.870.091		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	2	2	80.005.000	2	115.809.750	2	124.495.481	2	133.832.642	2	143.870.091		
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				110.325.000		225.186.700		242.075.703		260.231.380		279.748.734		
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	3 dok	3 dok	110.325.000	3 dok	225.186.700	3 dok	242.075.703	3 dok	260.231.380	3 dok	279.748.734		
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik				145.725.000		283.172.199		304.410.115		327.240.874		351.783.938		
Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	6	6	145.725.000	6	283.172.199	6	304.410.115	6	327.240.874	6	351.783.938		
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				963.128.901		2.340.711.425		2.457.746.996		2.580.634.346		2.709.666.063		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu (%)	100	100	963.128.901	100	2.340.711.425	100	2.457.746.996	100	2.580.634.346	100	2.709.666.063	4.01.0.00.0.00.48.0 042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				549.811.000		744.077.985		781.281.884		820.345.979		861.363.278		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	1	1	549.811.000	1	744.077.985	1	781.281.884	1	820.345.979	1	861.363.278		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	6	1		1		1		1		1			
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				95.682.000		107.940.000		113.337.000		119.003.850		124.954.043		
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	1	1	95.682.000	1	107.940.000	1	113.337.000	1	119.003.850	1	124.954.043		
4.01.03.1.01.0002 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum				189.557.000		249.280.185		261.744.194		274.831.404		288.572.974		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	6	1	189.557.000	1	249.280.185	1	261.744.194	1	274.831.404	1	288.572.974		
4.01.03.1.01.0003 - Fasilitas Penataan Wilayah				264.572.000		386.857.800		406.200.690		426.510.725		447.836.261		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (Dokumen)	2	1	264.572.000	1	386.857.800	1	406.200.690	1	426.510.725	1	447.836.261		
4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah				183.746.500		966.633.440		1.014.965.112		1.065.713.367		1.118.999.034		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	183.746.500	1	966.633.440	1	1.014.965.112	1	1.065.713.367	1	1.118.999.034		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	0	0		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	6	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	0	0		24		24		24		24			
4.01.03.1.02.0001 - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				174.372.500		262.500.000		275.625.000		289.406.250		303.876.563		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	6	10	174.372.500	10	262.500.000	10	275.625.000	10	289.406.250	10	303.876.563		
4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				8.314.000		131.250.000		137.812.500		144.703.125		151.938.281		
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	8.314.000	1	131.250.000	1	137.812.500	1	144.703.125	1	151.938.281		
4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1.060.000		310.383.440		325.902.612		342.197.742		359.307.629		
Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1.060.000	1	310.383.440	1	325.902.612	1	342.197.742	1	359.307.629		
4.01.03.1.02.0004 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				0		131.250.000		137.812.500		144.703.125		151.938.281		
Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	0	0	0	24	131.250.000	24	137.812.500	24	144.703.125	24	151.938.281		
4.01.03.1.02.0005 - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				0		131.250.000		137.812.500		144.703.125		151.938.280		
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	0	0	0	24	131.250.000	24	137.812.500	24	144.703.125	24	151.938.280		
4.01.03.1.03 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				229.571.401		630.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.751		
Jumlah Dokumen Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	5	6	229.571.401	6	630.000.000	6	661.500.000	6	694.575.000	6	729.303.751		
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	3	6		6		6		6		6			
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah				71.902.000		183.750.000		192.937.500		202.584.375		212.713.594		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	5	6	71.902.000	6	183.750.000	6	192.937.500	6	202.584.375	6	212.713.594		
4.01.03.1.03.0002 - Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				18.969.401		157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	3	6	18.969.401	6	157.500.000	6	165.375.000	6	173.643.750	6	182.325.938		
4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				138.700.000		288.750.000		303.187.500		318.346.875		334.264.219		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	5	1	138.700.000	1	288.750.000	1	303.187.500	1	318.346.875	1	334.264.219		
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				13.439.050.188		19.725.422.010		20.711.693.111		21.747.277.766		22.834.641.654		
Meningkatnya Fasilitas Bina Mental Spritual dan Akses Bantuan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	80	13.439.050.188	85	19.725.422.010	90	20.711.693.111	100	21.747.277.766	100	22.834.641.654	4.01.0.00.0.00.48.0 042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Persentase Fasilitas Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar (%)	86	80		85		90		100		100			
4.01.04.1.01 - Fasilitas Pembinaan Mental Spritual				11.064.750.188		14.281.492.770		14.995.567.409		15.745.345.779		16.532.613.068		
Jumlah Lembaga Bina Mental Spritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola (Unit)	1	1	11.064.750.188	1	14.281.492.770	1	14.995.567.409	1	15.745.345.779	1	16.532.613.068		
	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga)	150	150		150		150		150		150			
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual				762.818.000		922.115.985		968.221.784		1.016.632.873		1.067.464.517		
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola (Unit)	1	1	762.818.000	1	922.115.985	1	968.221.784	1	1.016.632.873	1	1.067.464.517		
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual				10.301.932.188		13.359.376.785		14.027.345.625		14.728.712.906		15.465.148.551		
Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga)	150	150	10.301.932.188	150	13.359.376.785	150	14.027.345.625	150	14.728.712.906	150	15.465.148.551		
4.01.04.1.02 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				2.374.300.000		5.338.929.240		5.605.875.702		5.886.169.487		6.180.477.961		
Jumlah Dokumen Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	800	600	2.374.300.000	600	5.338.929.240	600	5.605.875.702	600	5.886.169.487	600	6.180.477.961		
4.01.04.1.02.0001 - Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2.374.300.000		5.338.929.240		5.605.875.702		5.886.169.487		6.180.477.961		
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	800	600	2.374.300.000	600	5.338.929.240	600	5.605.875.702	600	5.886.169.487	600	6.180.477.961		
4.01.04.1.03 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				0		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				0		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				1.418.023.800		1.510.000.000		1.544.000.000		1.575.000.000		1.612.000.000		
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Penyelenggara pemerintah Dan Masyarakat Miskin	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi (%)	100	100	1.418.023.800	100	1.510.000.000	100	1.544.000.000	100	1.575.000.000	100	1.612.000.000	4.01.0.00.0.00.48.0043 - Biro Hukum	
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				514.052.450		531.000.000		549.000.000		565.000.000		582.000.000		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	60	20	514.052.450	20	531.000.000	20	549.000.000	20	565.000.000	20	582.000.000		

	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	410	320		320		320		320		400			
	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	60	60		60		60		60		60			
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				122.308.900		125.000.000		128.000.000		130.000.000		132.000.000		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	60	20	122.308.900	20	125.000.000	20	128.000.000	20	130.000.000	20	132.000.000		
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				61.039.550		66.000.000		71.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	300	300	61.039.550	300	66.000.000	300	71.000.000	300	75.000.000	300	80.000.000		
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				101.202.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	410	320	101.202.000	320	105.000.000	320	110.000.000	320	115.000.000	400	120.000.000		
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				229.502.000		235.000.000		240.000.000		245.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	60	60	229.502.000	60	235.000.000	60	240.000.000	60	245.000.000	60	250.000.000		
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				903.971.350		979.000.000		995.000.000		1.010.000.000		1.030.000.000		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Terlaksananya fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	6	6	903.971.350	6	979.000.000	6	995.000.000	6	1.010.000.000	6	1.030.000.000		
	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	6	6		6		6		6		6			
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				553.998.000		620.000.000		625.000.000		630.000.000		640.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	6	6	553.998.000	6	620.000.000	6	625.000.000	6	630.000.000	6	640.000.000		
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				349.973.350		359.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	6	6	349.973.350	6	359.000.000	6	370.000.000	6	380.000.000	6	390.000.000		
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				726.286.400		1.046.171.673		1.348.415.630		1.539.406.353		1.591.192.518		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Peresentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	726.286.400	100	1.046.171.673	100	1.348.415.630	100	1.539.406.353	100	1.591.192.518	4.01.0.00.0.00.48.0 044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				366.062.600		496.238.500		650.674.275		755.821.456		797.570.846		

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	15	4	366.062.600	4	496.238.500	4	650.674.275	4	755.821.456	4	797.570.846		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	15	4		4		4		4		4			
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				172.830.000		233.738.500		358.799.275		396.576.205		401.525.611		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	15	4	172.830.000	4	233.738.500	4	358.799.275	4	396.576.205	4	401.525.611		
4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				193.232.600		262.500.000		291.875.000		359.245.251		396.045.235		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	15	4	193.232.600	4	262.500.000	4	291.875.000	4	359.245.251	4	396.045.235		
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				39.793.400		43.772.740		55.656.858		69.525.225		79.562.000		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	15	4	39.793.400	4	43.772.740	4	55.656.858	4	69.525.225	4	79.562.000		
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				39.793.400		43.772.740		55.656.858		69.525.225		79.562.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	15	4	39.793.400	4	43.772.740	4	55.656.858	4	69.525.225	4	79.562.000		
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				320.430.400		506.160.433		642.084.497		714.059.672		714.059.672		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	12	4	320.430.400	4	506.160.433	4	642.084.497	4	714.059.672	4	714.059.672		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	12	4		4		4		4		4		
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				151.244.800		230.000.000		264.500.000		284.337.500		284.337.500	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	12	4	151.244.800	4	230.000.000	4	264.500.000	4	284.337.500	4	284.337.500	
4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				169.185.600		276.160.433		377.584.497		429.722.172		429.722.172	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	12	4	169.185.600	4	276.160.433	4	377.584.497	4	429.722.172	4	429.722.172	
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				528.808.500		620.000.000		760.454.720		906.545.664		1.020.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)	5	5-5	528.808.500	6-6	620.000.000	7-7	760.454.720	7-7	906.545.664	7-7	1.020.000.000	4.01.0.00.0.00.48.0 045 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				271.939.500		310.000.000		395.454.720		496.545.664		575.000.000	
Terselenggaranya Strategi, Pelaksanaan dan Monev Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	2	271.939.500	2	310.000.000	2	395.454.720	2	496.545.664	2	575.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				80.698.000		100.000.000		130.454.720		176.545.664		200.000.000	
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	2	80.698.000	2	100.000.000	2	130.454.720	2	176.545.664	2	200.000.000	
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				138.343.500		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	138.343.500	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				52.898.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	52.898.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100.306.000		120.000.000		135.000.000		150.000.000		165.000.000	
Terlaksananya Layanan SPSE, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1	100.306.000	1	120.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				29.449.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1	29.449.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				48.487.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	48.487.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				22.370.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	22.370.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000		
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				156.563.000		190.000.000		230.000.000		260.000.000		280.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Pembinaan kelembagaan dan SDM, serta Advokasi PBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	30	30	156.563.000	30	190.000.000	30	230.000.000	30	260.000.000	30	280.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				97.937.000		120.000.000		150.000.000		170.000.000		180.000.000		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	30	30	97.937.000	30	120.000.000	30	150.000.000	30	170.000.000	30	180.000.000		
4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				34.613.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	34.613.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				24.013.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	24.013.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000		
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				394.350.500		635.549.062		790.881.422		950.549.062		950.549.062		
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	394.350.500	100	635.549.062	100	790.881.422	100	950.549.062	100	950.549.062	4.01.0.00.0.00.48.0 044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				388.050.500		619.817.062		772.789.622		929.743.492		929.743.492		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Terkendalinya Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	8	4	388.050.500	4	619.817.062	4	772.789.622	4	929.743.492	4	929.743.492		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	8	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	17	4		4		4		4		4			

4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				253.404.000		305.252.932		396.351.239		496.839.350		496.839.350		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	17	4	253.404.000	4	305.252.932	4	396.351.239	4	496.839.350	4	496.839.350		
4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				90.099.000		193.614.000		239.355.308		275.258.604		275.258.604		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	8	4	90.099.000	4	193.614.000	4	239.355.308	4	275.258.604	4	275.258.604		
4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				44.547.500		120.950.130		137.083.075		157.645.538		157.645.538		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	8	4	44.547.500	4	120.950.130	4	137.083.075	4	157.645.538	4	157.645.538		
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				6.300.000		15.732.000		18.091.800		20.805.570		20.805.570		
Tersusunnya Jumlah Dokumen hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	16	1	6.300.000	1	15.732.000	1	18.091.800	1	20.805.570	1	20.805.570		
4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				6.300.000		15.732.000		18.091.800		20.805.570		20.805.570		
Tertaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	16	1	6.300.000	1	15.732.000	1	18.091.800	1	20.805.570	1	20.805.570		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.48.0000 - Sekretariat Daerah										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	70.25 (BB)	71.25 BB	73.25 BB	75.50 BB	77.05 BB	79.50 BB	80.01 A	
2	Persentase Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	80	80	80	85	90	100	100	
3	Cakupan Akses Kebijakan Layanan Dasar	%	80	80	80	85	90	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	90,41	90,45	90,51	90,61	90,71	90,81	90,91	
5	Nilai Akip Pemda	Nilai	68,88	68,9	69,88	70,05	70,08	70,15	71	
6	Indeks Berakhlak Pemda	Indeks	74,7	75,02	75,04	75,06	75,08	75,1	75,12	
7	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	50	60	65	70	75	80	80,06	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	69,96	71	71,5	72,5	75	77,5	80	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



9	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	48(sangattinggi)	48(sangattinggi)	49(sangattinggi)	50(sangattinggi)	51(sangattinggi)	52(sangattinggi)	53(sangattinggi)	
10	Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	Indeks	86,6	86,7	86,75	87	87,5	88	88,5	
11	Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian, SDA, BUMD, BLUD dan Administrasi Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	%	-	80	85	90	95	100	100	
12	Predikat PPD	Predikat	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	3.41-4.20	
13	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	3 (telah menetapkan sistim kerja)	3 (telah menetapkan sistim kerja)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	Indeks	87,41	87,43	87,45	87,48	87,51	87,53	87,55	
15	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	80	85	90	100	100	
16	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	0	0	100	100	100	100	100	
18	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Fasilitasi Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar	%	86	80	80	85	90	100	100	
20	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	72,23	75	77,23	79,63	81,53	83,21	85,01	
21	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80)	%	70,01	71	72,74	74,62	76,52	80,01	82,25	
22	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik	%	13,79	17,24	24,14	34,48	51,72	68,97	86,21	
23	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	5	5-5	5-5	6-6	7-7	7-7	7-7	
24	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis	%	86,57	86,92	87,99	89,05	90,11	91,17	100	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



27	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat	%	74,7	75	75,2	75,7	76,2	76,7	77,2	
29	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik	%	87,77	88	88,5	89,2	90,01	92,2	93,01	
30	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.0.00.0.00.48.0042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat										
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	80	80	85	90	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar	%	86	80	80	85	90	100	100	
5	Presentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.0.00.0.00.48.0043 - Biro Hukum										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.0.00.0.00.48.0044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan										
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.0.00.0.00.48.0045 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	5	5-5	5-5	6-6	7-7	7-7	7-7	
4.01.0.00.0.00.48.0046 - Biro Organisasi										
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	72,23	75	77,23	79,63	81,53	83,21	85,01	
2	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik	%	87,77	88	88,5	89,2	90,01	92,2	93,01	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80)	%	70,01	71	72,74	74,62	76,52	80,01	82,25	
4	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik	%	13,79	17,24	24,14	34,48	51,72	68,97	86,21	
5	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis	%	86,57	86,92	87,99	89,05	90,11	91,17	100	
6	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat	%	74,7	75	75,2	75,7	76,2	76,7	77,2	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.48.0042 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
1.	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
			4.01.03.1.01.0002 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
2.	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Fasilitas Bina Mental Spiritual dan Akses Bantuan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar	4.01.04.1.01 - Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	
			4.01.04.1.01.0002 - Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	
			4.01.04.1.02 - Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.02.0001 - Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
4.01.0.00.0.00.48.0043 - Biro Hukum				
3.	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Penyelenggara pemerintah Dan Masyarakat Miskin	4.01.05.1.01 - Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	
			4.01.05.1.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	
			Pengaturan	
			4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum	
			4.01.05.1.02.0001 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	
			4.01.05.1.02.0002 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
4.01.0.00.0.00.48.0044 - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan				
4.	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
			4.01.06.1.01.0001 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
			4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
			4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	
5.	4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
4.01.0.00.0.00.48.0045 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
6.	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



			4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.48.0046 - Biro Organisasi				
7.	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Tata Kelola organisasi Pemerintah Daerah	4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.02.1.01.0001 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	
			4.01.02.1.01.0002 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
			4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	
			4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
			4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
			4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
			4.01.02.1.02.0005 - Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	
4.01.0.00.0.00.48.0047 - Biro Umum				
8.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Biro Umum)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			4.01.01.1.14 - Fasilitas Keprotokolan	
			4.01.01.1.14.0001 - Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
			4.01.01.1.14.0002 - Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.48.0000 - Sekretariat Daerah									
2.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	70.25 (BB)	71.25 BB	73.25 BB	75.50 BB	77.05 BB	79.50 BB	80.01 A	
3.	Persentase Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	80	80	80	85	90	100	100	
4.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	90,41	90,45	90,51	90,61	90,71	90,81	90,91	
5.	Cakupan Akses Kebijakan Layanan Dasar	%	80	80	80	85	90	100	100	
6.	Nilai Akip Pemda	Nilai	68,88	68,9	69,88	70,05	70,08	70,15	71	
7.	Indeks Berakhlak Pemda	Indeks	74,7	75,02	75,04	75,06	75,08	75,1	75,12	
8.	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	50	60	65	70	75	80	80,06	
9.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	69,96	71	71,5	72,5	75	77,5	80	
10.	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	48(sangattinggi)	48(sangattinggi)	49(sangattinggi)	50(sangattinggi)	51(sangattinggi)	52(sangattinggi)	53(sangattinggi)	
11.	Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	Indeks	86,6	86,7	86,75	87	87,5	88	88,5	
12.	Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian, SDA, BUMD, BLUD dan Administrasi Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	%	-	80	85	90	95	100	100	
13.	Predikat PPD	Predikat	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	3.41-4.20	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



14.	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	3 (telah menetapkan sistim kerja)	3 (telah menetapkan sistim kerja)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	
15.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	Indeks	87,41	87,43	87,45	87,48	87,51	87,53	87,55	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Indeks Reformasi Birokrasi General	positif	Indeks	70.25 (BB)	71.25 BB	73.25 BB	75.50 BB	77.05 BB	79.50 BB	80.01 A	
3.	Persentase Fasilitasi Bina Mental Spiritual	positif	%	80	80	80	85	90	100	100	
4.	Cakupan Akses Kebijakan Layanan Dasar	positif	%	80	80	80	85	90	100	100	
5.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	positif	Indeks	90,41	90,45	90,51	90,61	90,71	90,81	90,91	
6.	Nilai Akip Pemda	positif	Nilai	68,88	68,9	69,88	70,05	70,08	70,15	71	
7.	Indeks Berakhlak Pemda	positif	Indeks	74,7	75,02	75,04	75,06	75,08	75,1	75,12	
8.	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	positif	Indeks	50	60	65	70	75	80	80,06	
9.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	positif	Indeks	69,96	71	71,5	72,5	75	77,5	80	
10.	Indeks Kematangan Organisasi	positif	Indeks	48(sangattinggi)	48(sangattinggi)	49(sangattinggi)	50(sangattinggi)	51(sangattinggi)	52(sangattinggi)	53(sangattinggi)	
11.	Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	positif	Indeks	86,6	86,7	86,75	87	87,5	88	88,5	
12.	Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian, SDA, BUMD, BLUD dan Administrasi Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	positif	%	-	80	85	90	95	100	100	
13.	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	positif	Nilai	3 (telah menetapkan sistim kerja)	3 (telah menetapkan sistim kerja)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	4 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	5 (telah menetapkan sistim kerja dan menerapkan squad team serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP)	
14.	Predikat PPD	positif	Predikat	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	2.61-3.40	3.41-4.20	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



15.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	positif	Indeks	87,41	87,43	87,45	87,48	87,51	87,53	87,55	
16.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya	komulatif	%	100	80	80	85	90	100	100	
20.	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	positif	%	72,23	75	77,23	79,63	81,53	83,21	85,01	
21.	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik	positif	%	87,77	88	88,5	89,2	90,01	92,2	93,01	
22.	Persentase Fasilitasi Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar	positif	%	86	80	80	85	90	100	100	
23.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
24.	Tingkat kematangan UKPBJ	positif	Level	5	5-5	5-5	6-6	7-7	7-7	7-7	
25.	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80)	positif	%	70,01	71	72,74	74,62	76,52	80,01	82,25	
26.	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
27.	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik	positif	%	13,79	17,24	24,14	34,48	51,72	68,97	86,21	
28.	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis	positif	%	86,57	86,92	87,99	89,05	90,11	91,17	100	
29.	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat	positif	%	74,7	75	75,2	75,7	76,2	76,7	77,2	
30.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
32.	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	positif	%	0	0	100	100	100	100	100	
33.	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	80	80	80	85	90	100	100	
34.	Persentase Fasilitasi Layanan Kesejahteraan Rakyat Urusan Layanan Dasar	positif	%	86	80	80	85	90	100	100	
35.	Tingkat kematangan UKPBJ	positif	Level	5	5-5	5-5	6-6	7-7	7-7	7-7	
36.	Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80)	positif	%	70,01	71	72,74	74,62	76,52	80,01	82,25	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



37.	Persentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
38.	Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik	positif	%	13,79	17,24	24,14	34,48	51,72	68,97	86,21	
39.	Persentase PD telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis	positif	%	86,57	86,92	87,99	89,05	90,11	91,17	100	
40.	Persentase PD yang memiliki budaya kerja dengan kategori sehat	positif	%	74,7	75	75,2	75,7	76,2	76,7	77,2	
41.	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik	positif	%	87,77	88	88,5	89,2	90,01	92,2	93,01	
42.	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	positif	%	72,23	75	77,23	79,63	81,53	83,21	85,01	
43.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
44.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan SPM tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
45.	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB V

PENUTUP

➤ Kesimpulan

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029 ini merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemangku jabatan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekaligus acuan bagi stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

➤ Kaidah Pelaksanaan

Guna menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah maka terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis yang perlu ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.
4. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sekretariat Daerah setiap tahunnya dalam periode 2025 s/d 2029
5. Adapun besaran anggaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini masih bersifat indikatif dan masih dapat berubah kedepannya mengingat masih terdapat beberapa tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.
6. Dalam hal pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 kedepannya, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi pada tahun pelaksanaan dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang ada maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





➤ **Pengendalian dan Evaluasi**

Dalam rangka menjamin keterlaksanaan Renstra, mekanisme pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik melalui monitoring capaian kinerja, pengukuran indikator, serta analisis terhadap hambatan maupun peluang yang muncul. Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan, sekaligus memastikan agar seluruh kebijakan yang ditempuh tetap selaras dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Renstra Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

